

Soegiri DS
Edi Cahyono

GERAKAN SERIKAT BURUH

Jaman Kolonial Hindia Belanda
Hingga Orde Baru

HASTA MITRA

penerbit buku bermutu

Perburuan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru (Indonesia - 1998)

OLEH: EDI CAHYONO*

PROLOG

Abad ke-19 adalah abad paling revolusioner dan penuh perubahan dalam sejarah kepulauan yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Di awal abad itu konsep negara-kolonial Hindia Belanda—disiapkan oleh Herman Willem Daendels (1808-1811)—seorang penga-gum revolusi Perancis—untuk mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC).

Di abad itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Lembaga keuangan *Nederlansche Handels-Maatschappij* (NHM)¹ dan *Javasche Bank*² didirikan. Tampil pengusaha-pengusaha Eropa

* Aktif di Yayasan Penebar-Jakarta.

¹ NHM dibentuk atas inisiatif raja Willem I, dalam rangka menghancurkan hegemoni komersial Inggris di Jawa. Pada kurun tersebut Inggris dengan 'perdagangan bebas'-nya, memiliki armada kapal lebih dari 100, dari 171 kapal yang berlabuh di Batavia, kapal Belanda hanya 43 buah. Berangkat dari sini upaya-upaya memajukan perdagangan Belanda didorong untuk diwujudkan dalam bentuk satu maskapai besar. Modal pertama untuk NHM sebesar satu juta *gulden*, sedang langkah pertama keterlibatannya dalam perdagangan adalah, dengan memberikan hak penjualan kopi Priangan selama duabelas tahun. Pemberian prioritas dan keistimewaan dalam menjual hasil-hasil Jawa di Eropa ini, implisit berarti penanaman gubernemen harus diperluas. (Polak, 1961, "Tentang Cultuurstelsel dan Penggantiannya," hal. 17-8)

² Dalam prakteknya selama kurun *cultuurstelsel* peranan *Javasche Bank* kurang nampak, lembaga ini baru menunjukkan sosoknya dalam kurun pasca 1870. Hal ini terjadi karena modal nominal yang dijanjikan oleh pemerintah Belanda sebesar 4 juta *gulden* ternyata yang masuk dalam sirkulasi bank ini hanya setengah juta *gulden*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang dalam kondisi benar-benar defisit akibat menbiayai perang Jawa. (Mansvelt, 1924, *Geschiedenis van de Nederlandsche Handelmaatschappij*. Jilid I. Dicitak oleh Joh Enschede en Zonen Haarlem, hal. 192) Sehingga bank ini hanya berfungsi sebagai penyalur keuangan NHM saja.

mengelola industri perkebunan dan pabrik-pabrik,³ sementara kaum bumiputera disiapkan menjadi buruh.

Perjalanan perburuhan sejak jaman kolonial Hindia Belanda-tonggak pentingnya adalah 1830-1870 sebagai kurun *Cultuurstelsel*, sedang setelah 1870, –pencanangan *Agrarische Wet*–, adalah jaman liberalisme–hingga tahun 1998 (Indonesia di akhir Rejim Soeharto–Orde Baru–) adalah periode yang sangat panjang. Melewati masa-masa yang berbeda-beda, tulisan ini akan mencoba memunculkan hal-hal penting perburuhan yang pernah terjadi dalam rentang panjang tersebut.

Tentu tidak semua aktivitas buruh dan serikat buruh dapat dicakup di dalam tulisan ini. Namun paling tidak tonggak-tonggak besar maupun peristiwa yang berpengaruh luas akan dicoba untuk ditampilkan.

HINDIA BELANDA ABAD KE-19

Di abad ini telah ada buruh–karena industrial kapitalistik (hubungan buruh dengan modal) untuk memproduksi barang-dagangan secara masal (*generalized commodity production*) telah dimulai sejak 1830.

Pada Mei 1842, saat terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang–Karesidenan Pekalongan–di desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Residen meminta tanah-tanah baru yang berkondisi baik untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa. Pada 22 Oktober, kontrolir Batang melaporkan, sejumlah 46 desa yang penduduknya melakukan *cultuurdienst* tebu untuk masa tanam tahun yang lalu belum dilunasi upahnya untuk kerja musim panen tahun ini. Sebabnya, mereka dianggap belum cukup

³ Untuk industri-perkebunan gula, di awal *cultuurstelsel* terdapat 30 kontraktor, terdiri dari 17 Tionghoa, 7 Belanda dan 6 Inggris. Hanya orang-orang Inggris saja yang telah menggunakan tehnologi mesin uap, yang lainnya masih menggunakan pengepres 'tradisional.' Orang-orang Belanda baru mendatangkan mesin-mesin canggih dalam tahun-tahun 1835-1836. (Deer, 1949, *The History of Sugar*, hal. 222).

memenuhi pajak *natura* tebu yang harus diserahkan, yang ada dalam kontrak-kerja tahun 1841, dengan upah sebesar 14,22 *gulden* per kepala. Keadaan menggantung, *planter* (penanam tebu) yang terlibat kerja *onderneming* tersebut tidak mau melunasi pajak *natura* yang dibebankan melainkan justru berbalik melakukan tuntutan untuk kenaikan upah dari 14,22 *gulden* menjadi 25 *gulden*. Protes *planter* ini terjadi pada 24 Oktober 1842, dan diikuti 600 *planter* dari 51 desa.⁴

Di Yogyakarta tahun 1882 terjadi pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 melanda empat pabrik gula (PG). Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Lokasi pemogokan adalah Kabupaten Kalasan (pabrik gula Barongan), Kabupaten Sleman (PG. Padokan, PG. Cebongan, PG. Bantul). Isu pemogokan tersebut adalah: 1). Upah; 2). kerja gugur-gunung yang terlalu berat; 3). kerja jaga (*wachtdiensten*) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari; 4). kerja *moorgan* yang tetap dilaksanakan padahal tidak lazim lagi; 5). upah tanam (*plaantloon*) yang sering tidak dibayar; 6). banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib; 7). harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar; 8). beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.⁵

Dilihat dari jumlah orang dan desa yang terlibat protes tentu ini protes besar. Namun disebabkan belum ada organisasi modern (serikat, partai, dsb.), seringkali aktivitas politik buruh seperti melakukan protes dan mogok belum menjadi perhatian para penulis, peneliti sejarah sosial-politik. Hal serupa ini tentu bisa

⁴ Ada beberapa sumber sejalan yang dapat dilihat untuk merekonstruksi hal tersebut, seperti: *Besluit* 2 Februarij 1843; *Proces verbal* 29 November 1842; *Missive Raad van Indie* kepada Residen Pekalongan, 10 Desember 1842; *Missive* Residen Pekalongan kepada Gubernur Jenderal, 12 Nov. 1842; *missive* Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures*, 4 Januari 1843. Untuk rekonstruksi yang memadai masalah tersebut lihat Edi Cahyono, 2001, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, khususnya bab-V, LEC.

⁵ Djoko Utomo, "Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19: Kasus Yogyakarta," *Prisma*, 8 Agustus 1983, hal. 68-78.

didapatkan di berbagai wilayah kantong (*enclave*) industri masa tersebut.

Bila kita membaca hasil-hasil penelitian abad ke-19 cenderung diangkat persoalan protes petani. Sementara petani di Hindia Belanda adalah petani yang tidak dapat dikategorikan sebagai *farmer* (tuan tanah kapitalis), namun lebih merupakan *peasant* (petani gurem/miskin). Kaum tani gurem ini untuk hidupnya harus bekerja pada industri-perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga sebetulnya yang dimaksud dengan protes petani—dengan telah adanya produksi barang dagangan secara massal—adalah buruh.

Sedikit penjelasan tentang petani di abad ke-19. Dalam konsepsi Barat akses seseorang terhadap tanah akan menentukan seseorang diklasifikasikan sebagai *farmer* atau *worker* (buruh). Sementara di masyarakat Asia (*Asiatic mode of production*) hal ini berbeda.

Memang petani di pulau Jawa punya akses terhadap tanah negara (*soverein bezit*). Hal ini dalam konstruksi Van den Bosch adalah pranata bumiputra. Sedangkan untuk mengolah tanah digunakan ikatan-ikatan adat. Pengalokasian sebidang tanah kepada satu keluarga, berarti pembebanan dari negara (tradisional/kerajaan) atas petani untuk menuntut sebagian dari hasil tanah tersebut bagi kepentingan penguasa bumiputra tertinggi (*soverein*).⁶

Di dalam desa-desa terdapat distribusi periodik atas tanah, dan ada surplus agrikultur yang dialirkan atau diserahkan kepada bupati atau raja dalam bentuk-bentuk upeti. Dengan menggunakan bentuk penguasaan tanah-upeti seperti ini diterapkan suatu sistem yang mengandalkan jalur-jalur ini, untuk memobilisasi petani menjadi buruh.

Thomas Stamford Raffles, dalam kurun pemerintahannya yang singkat di Jawa (1811-1816), telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan mendasar di Jawa. Dia menerapkan pengambil-alihan seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara (*domein*), bagi dia tidak ada pemilikan tanah pribadi/individual

⁶ Van Den Bosch, *Eenige Zakelijke Extracten uit een Algemeen overzicht, door Z.E. den Kommissaris Generaal Van Den Bosch, te zamen gesteld, gedagteekend 24 Januarij 1834*. Disisipkan dalam Arsip Karesidenan Pekalongan 7/1-4.

dalam masyarakat bumiputra. Raffles menginterpretasikan gejala penye-raphan upeti pada para penguasa bumiputra sebagai bukti dari pemilikan tanah negara. Kebijakan Raffles sebetulnya dipengaruhi oleh sistem sosial *Zamindar* (“tuan-tanah”) yang ada di India, jajahan Inggris.⁷

Oleh Van den Bosch, konsep Raffles tentang pemilikan tanah negara ini diadaptasi dan digunakan untuk berlangsungnya *cultuurstelsel* dengan melakukan modifikasi-modifikasi. Seperti, jika dalam konsep Raffles, tanah yang diambil negara itu sebagai upaya menarik uang dari petani karena petani menjadi penyewa sehingga wajib membayar sewa tanah (*landrente*); oleh den Bosch kini dibalik yaitu tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat bumiputra, namun pengembalian tanah-tanah tersebut disertai beban yakni setiap petani yang mendapat atau menguasai tanah, wajib menanami tanah tersebut dengan tanaman dagang konsumsi dunia, atau menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari pada *onderneming-onderneming* pemerintah. Pewajiban kerja yang diajukan Bosch ini dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak (*lanrente*).⁸

Di masa selanjutnya, mempekerjakan petani sebagai buruh semakin tidak dilandaskan pada penguasaan tanah, seperti dilaporkan oleh *Commisie Umbgrove*. Diferensiasi sosial masyarakat desa sejak *sikep* (petani kaya) yang juga dapat mencakup posisi *loerah*, *wedono* dsb., jelas mempunyai akses terhadap tanah. Namun beberapa lapisan sosial di bawah seperti *menoempang*, *boedjang* lebih merupakan buruh ketimbang lapisan sosial berakses tanah. Dua klasifikasi sosial belakangan adalah potensial menjadi buruh.⁹ Dan meskipun di beberapa daerah terjadi perubahan istilah dari *sikep* menjadi *kuli*

⁷ Untuk ini bisa dilihat dalam karya Thomas Stamford Raffles, 1817, *The History of Java*. Yang digunakan terbitan Oxford University 1982, pengantar oleh John Bastin. Kuala Lumpur. Lihat penjelasan pada hal. 135-7.

⁸ Untuk membandingkan kedua sistem yang diterapkan oleh Raffles dan Van den Bosch, dapat diikuti dalam Sutjipto (ed.) *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) Jilid IV, hal. 57-89.

⁹ Lihat misalnya *Memorie van Overgave* residen-residen Cirebon dari J. van Marel, tanggal 22 April 1922, atau R.Ph.M. van der Meer, 9 April 1925 maupun dari C.J.A.E.T. Hiljee, 3 Juni 1930. (*Memori Serah Jabatan 1921-1930, (Java Barat)*, 1976, ANRI, hal. 185-238.)

kenceng atau *kuli kendo* hal ini tidak berarti mereka dapat dipaksa melepas hak-hak istimewa yang dimilikinya, atau turun statusnya menjadi *buruh tani*. Mereka tetap bertahan sebagai klas petani-kaya yang tidak perlu menjual tenaga kerjanya pada orang lain, atau pada pabrik.¹⁰

Setelah 1870 perkembangan industri menjadi demikian pesat. Jaman yang dikenal sebagai Jaman Liberal ini direspon secara optimal oleh kalangan swasta Eropa. Beberapa perusahaan perdagangan swasta mengambil alih peran yang selama ini dilakukan oleh NHM, seperti Maclaine Watson (telah berdiri sejak 1820), George Wehry (1862), Borneo Sumatra Maatschappij (Borsumij) (1894). Dan beroperasi bank-bank swasta seperti Nederlandsch-Indisch Escompto Maatschappij (1857), Nederlandsch Indisch Handelsbank (1863), Rotterdamsche Bank (1863), Internationale Credit-en Handelsvereniging Rotterdam (Internatio) (1863), Handelsvereniging Amsterdam (HVA) (1878), dan Koloniale Bank (1881), dan sebuah bank yang terbatas operasinya di *Vorstelanden*, Dorrepaalsche Bank (1884).¹¹ Karena aktivitas mereka mendukung dana industri pertanian/perkebunan, bank-bank tersebut dikenal pula sebagai *cultuurbanken*.

Dalam hal pertanahan, para kapitalis perkebunan tersebut diperkenankan melakukan penyewaan tanah jangka panjang, selama 75 tahun disebut *erfpacht*.

Investasi tidak hanya di Pulau Jawa saja namun juga merambah Pulau Sumatera. Bila Investasi di Jawa memerlukan proses-proses panjang dalam mentrans-formasikan petani menjadi buruh; struktur feodal/kerajaan menjadi struktur birokrasi kolonial. Hal ini tidak terjadi dalam pembukaan Sumatera Timur.

Hal berbeda yang berkembang di Sumatera Timur adalah, perkebunan-perkebunan tembakau dibangun mulai tahun 1863 di daerah Deli oleh Jacobus Nienhuys, mendatangkan buruh-buruh dari luar wilayah tersebut, seperti dari Semenanjung Melayu

¹⁰ Gunawan Wiradi, 1983, "Kuli Kenceng di Pedesaan Jawa - Apa Masih Ada?," *Kompas*.

¹¹ Allen, George C. dan Donnithorne, Audrey G. 1957. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A study in Economic Development*. George Allen & Unwin Ltd. London. Hal. 168.

(Malaysia dan Singapura), Pulau Jawa. Mereka diikat dengan kontrak. Dan kontrak tersebut tidak dapat diakhiri oleh sang buruh. Bila buruh berusaha melarikan diri dari tempat kerja mereka akan dikenakan hukuman yang dikenal sebagai *poenale sanctie*.¹² suatu hukuman yang dalam ukuran sejaman pun sangat kejam yaitu dapat berupa hukum cambuk untuk buruh laki-laki hingga dibunuh—Jacobus Nienhuys, pemilik Deli Maatschappij, menghukum cambuk 7 buruhnya hingga mati, hal mana membuat dia pergi tergesa-gesa dari Sumatera Timur.¹³ Kasus lain, seorang buruh perempuan diikat pada bungalow tuan kebun dan kemaluannya digosok dengan lada.¹⁴ Penyiksaan-penyiksaan ini, oleh Breman, disebut menjalankan produksi menggunakan teror. Para pemilik perkebunan mempunyai otonomi begitu luas sehingga perkebunan-perkebunan itu menjadi “negara dalam negara.”

Peristiwa aksi buruh menjadi tidak atau kurang muncul di dalam abad ke-19 lebih disebabkan belum ada organisasi serikat buruh.

JAMAN BERGERAK

Serikat-serikat buruh orang-orang Eropa di Hindia Belanda berdiri sejak akhir abad ke-19. Berturut-turut lahir Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NIOG) tahun 1897; Staatsspoor Bond (SS Bond) didirikan di Bandung pada 1905; Suikerbond (1906); Cultuurbond, Vereeniging v. Assistenten in Deli (1907); Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Ned-Indie,

¹² Jan Breman, 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*, Grafiti Pers. *Poenale Sanctie* berlangsung tidak hanya pada jajahan Belanda saja tetapi berlangsung pula di jajahan Inggris dan Perancis (hal. xxii). Bentuk *Poenale Sanctie* dipilih karena *enclave-anclave* perkebunan tersebut menjadi dikelola seperti perkebunan yang mengandalkan budak (*unfree labour*) di Amerika Selatan. Dengan cara ini buruh sebetulnya berkondisi seperti budak. Upah jadi dapat ditekan serendah mungkin.

¹³ Jan Breman, 1997. *Ibid.* hal. xxi.

¹⁴ Jan Breman, 1997. *Ibid.* Buku Breman ini mengetengahkan laporan yang dibuat oleh Jaksa Tinggi J.L.T. Rhemrev di mana penyelidikan yang telah dilakukannya telah tidak diumumkan oleh pemerintah kolonial. Disebabkan penyelidikan tersebut menyampaikan berbagai ‘pelanggaran HAM’ yang dilakukan para pengusaha. Pemerintah Nederland merasa hal-hal seperti itu tidak perlu disampaikan kepada publik. Sementara Breman menganggap itu soal besar, harus diungkapkan ke publik. (Lihat: “Pengantar Cetakan Ketiga Khusus Edisi Belanda,” hal. xv-xxxviii).

berdiri 1908 di Semarang; Bond van Geemployeerden bij de Suikerindustrie op Java (Suikerbond) tahun 1909 di Surabaya; Bond van Ambtenaren bij de In-en Uitvoerrechten en Accijnzijen in Ned-Indie (Duanebond) tahun 1911; Bond van Ambtenaren bij den Post-, Telegraaf-en Telefoon dienst (*Postbond*) tahun 1912; Burgerlijke Openbare Werken in Ned-Indie (BOWNI) tahun 1912; Bond van Pandhuis Personeel (Pandhuisbond) (1913).

Ciri serikat-serikat buruh ini adalah: Pertama, tidak ada motif-motif ekonomi dalam proses pendiriannya. Tidak ada masalah pada sekitar tahun berdirinya serikat-serikat buruh tersebut misalnya, soal rendahnya tingkat upah, atau pun buruknya kondisi sosial tenaga kerja “impor.” Faktor yang mendorong pembentukan mereka adalah pertumbuhan pergerakan buruh di Belanda.¹⁵ Pada sekitar 1860-1870 di Nederland sedang mengalami pertumbuhan pergerakan buruh. Dan sejak 1878 ada pengaruh gerakan sosial-demokrat yang mendorong berdirinya National Arbeids Secretariats (NAS) sebagai induk organisasi.¹⁶

Pada saat itu di Hindia Belanda ada ketentuan pasal 111 *Regeling Reglement* (RR) yang melarang dilakukannya rapat dan pembentukan sebuah organisasi tanpa ijin khusus dari pemerintah kolonial. Namun disebabkan pada tahun 1903 pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi susunan pemerintah kolonial seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Batavia menjadi suatu *gemente* dan pengaturannya dilaksanakan oleh *gementeraad* (dewan kota). Menjadikan 111 RR tidak berlaku.

... hak berserikat dan berkoempoel diakoe tentang praktikjnja, artinja diberi kelapangan, meskipoen beloem ditetapkan didalam oendang-oendang. Dengan segera peroebahan-peroebahan itoe kelihatan pengaroehnja: gerakan politiek jang amat ramai terbitlah dalam golongan bangsa Eropah.¹⁷

¹⁵ Sandra, 1953, “Sedjarah Gerakan Buruh di Indonesia,” *Tindjauan Masalah Perburuhan*, 3-4, VI, Juni-Juli, Kementrian Perburuhan Republik Indonesia, 1954, hal 7. Madjid Siregar, *Perkembangan Serikat Buruh di Beberapa Negara*, Penerbit Kebangsaan Pustaka Rajat N.V., Djakarta. Hal 29-40.

¹⁶ Sandra, 1961. *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. PT. Pustaka Rakjat. Djakarta. Hal. 8-9.

¹⁷ J.J. Schrieke, *Atoeran-Atoeran dan Asas-Asas Pembagian Kekoeasaan (Desentralisasi)*, Terj. Agus Salim, Balai Pustaka, Batavia, 1922, hal. 9-14.

Pembentukan serikat-serikat oleh buruh “impor” ini selain merupakan pengaruh dari perkembangan gerakan buruh yang berlangsung di Eropa pula merupakan bagian dari kepentingan “politik” terbatas kehidupan kota.

Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh ini tidak hanya merekrut anggota “impor” saja, akan tetapi juga menerima kalangan bumiputera. Ini terjadi sebagai pengaruh semangat etis.

Program Pendidikan yang merupakan salah satu program dalam politik balas jasa *Etische Politiek* di awal 1900 memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera. Ditambah lagi dengan pembentukan serikat-serikat oleh buruh “impor,” telah memicu serikat buruh dibangun oleh kaum bumiputera dalam masa-masa sesudahnya. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah:

Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP) tahun 1911; Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912; Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912; Persatoean Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) tahun 1914; Opium Regie Bond (ORB) dan Vereeniging van Indlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken (VIPBOUW) tahun 1916; Personeel Fabriek Bond (PFB) tahun 1917.

Di kalangan Tionghoa pada 26 September 1909, di Jakarta, dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaum Boeroeh Tionghoa.

Perhimpoean Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) didirikan tahun 1917, di lingkungan industri gula. Organisasi ini dikembangkan dari Porojitno yang dibentuk oleh Sarekat Islam (SI) dan ISDV Surabaya pada tahun 1916. PKBT kemudian dipecah menjadi dua di tahun 1918 yaitu Perhimpoean Kaoem Tani (PKT) dan Perhimpoean Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). PKBO kemudian digabung dengan Personeel Fabriek Bond (PFB), sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soerjopranoto tahun 1917.¹⁸

VERENIGING SPOOR-TRAAM PERSONEN (VSTP) didirikan

pada 14 November 1908 di Semarang, Jawa Tengah oleh 63 buruh “impor” Eropa yang bekerja pada 3 jalur kereta *Nederlansch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS), *Semarang-Joana Maatschappij Stoomtram* (SJS) dan *Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij* (SCS).¹⁹ Rapat umum VSTP pada Pebruari 1914 diputuskan dari posisi tujuh anggota eksekutif tiga diambil dari kaum bumiputera. Jumlah anggota VSTP diakhir 1913 adalah 1.242 (673 Eropa dan 569 Bumiputera), dan pada Januari 1915 beranggotakan 2.292 dan anggota bumiputera telah mencapai 1.439. Tahun 1915 VSTP menerbitkan *orgaan* (surat kabar) *Si Tetap*, dalam bahasa Melayu. Moehamad Joesoef menjadi editornya. Joesoef pun terpilih menjadi Ketua Pusat bersama pemuda berusia 16 tahun, Semaoen.

Semaoen kemudian masuk ke VSTP cabang Surabaya pada paruh akhir 1914, dan dia terpilih menjadi ketua cabang di awal 1915. Pada 1 Juli 1916, Semaoen pindah ke Semarang menjadi propagandis utama VSTP dan editor *Si Tetap*. Semaoen begitu gigih membangun VSTP. Pada 1920 dia telah membangun 93 (sembilan-puluh tiga) cabang di Pulau Jawa (Cirebon, Semarang, Yogya, Surabaya, Madiun), beberapa di pantai Barat Sumatera dan pada perkebunan Deli. Anggota VSTP pada Mei 1923 telah mencapai 13.000 orang, atau seperempat buruh industri perkeretaapian Hindia Belanda. Tercatat 60 persen anggota pasti membayar iuran, sisanya membayar iuran organisasi pula namun tidak terlalu patuh.

Pemogokan VSTP pada April 1923 berakibat Semaoen—berdasarkan *Gouvernement Besluit* tanggal 4 Agustus 1923—diasingkan ke Nederland. Dia berangkat pada 18 Agustus 1923

¹⁸ F. Tichelman, *Socialisme in Indonesie. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging: 1897-1917*, Foris Publication, Dordrecht, 1985, hal. 15, 46, 269.

¹⁹ John Ingleston, “‘Bound, Hand and Foot’: Railway Workers And The 1923 Strike in Java,” *Indonesia*, 31 (April 1981), Cornell Modern Indonesia Project, hal. 53-87.

²⁰ *Sinar Hindia*, 18 Agustus 1924, no. 154. Semaoen kembali ke Indonesia pada tahun 1957. Tahun 1961 dia mendapat gelar Doktor *Honouriscausa* (HC) dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad). Saat itu Rektor Unpad adalah Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Dalam kesempatan itu Semaoen menguraikan ceramah yang kemudian dibukukan dengan judul: “Tenaga Manusia Postulat Teori Ekonomi Terpimpin.” Tulisan tersebut diterbitkan oleh PT.

menumpang kapal *S.S. Koningin der Nederlanden*.²⁰

Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) adalah gagasan Sosrokardono, ketua PPPB (Pegawai Pegadaian), dilontarkan Mei 1919. Hal ini juga dilontarkan dalam Kongres SI ke IV, Oktober 1919, di Surabaya. Soerjopranoto memperkuat untuk realisasi PPKB. Berdirilah PPKB dengan Semaoen sebagai ketua dan Soerjopranoto sebagai wakil ketua. Maksud dan tujuan PPKB seperti di dalam anggaran dasar pasal 2 adalah:

“Ia bermaksud mengadakan dan mengadakan persatoean antara sederadjaat kaum buruh supaya dapat suatu kekuasaan; kekuasaan itoe akan dipergunakan umumnja buat memperhatikan keperluanja kaum buruh dalam perkaranja lahir dan batin, jang pertama keperluanja lid²nja vakhbond jang sudah bersatu dalam PPKB.”²¹

Cara yang akan ditempuh:

“PPKB akan memasakkan itu dengan 3 djalan jang ada, jaitu: “berichtiar mendapat kuasa dalam pamerintahan negeri supaya negeri terperintah—oleh—rakjat—sendiri mengurus djalannya redjeki” (*sociaal democratisch politiek*), “mengeratkan kaum buruh dalam pekerdjaannya guna merobah nasibnja” (*vakstrijd*), mengadakan perdagangan—oleh—dan—boeat—rakjat (koperasi).”²²

Kongres I PPKB dilakukan pada 1 Agustus 1920 di Semarang. Pada bulan Juni 1921 diadakan suatu konperensi di Yogya. Hal ini menimbulkan perpecahan PPKB. Sehingga kemudian kedudukan organisasi dipindah dari Semarang ke Yogyakarta. Pecahan PPKB membentuk gabungan baru bernama *Revolutionaire Vakcentrale* diketuai oleh Semaoen.²³

Pemogokan-pemogokan dengan mengandalkan organisasi mulai gencar terjadi di tahun 1920-an. PFB tahun 1920 memobilisasi pemogokan disebabkan majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi yang mewakili anggotanya. Di Surabaya pada 15 Nopember 1920 pada *Droogdok Maatschappij* terjadi pemogokan

Penerbitan Universitas Djakarta pada tahun 1961.

²¹ Sandra, 1961. *Ibid.*, hal. 22.

²² Sandra, 1961. *Ibid.*, hal. 22.

²³ Sandra, 1961. *Ibid.*, hal. 24.

diikuti sekitar 800 buruh. Agustus 1921 pemogokan terjadi di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya. Medio Januari 1922 pegawai pegadaian mogok mencakup 79 rumah-gadai dengan sekitar 1.200 buruh (PPPB). Buruh kereta-api didukung sekitar 8.500 buruh mogok pada April 1923 (VSTP).²⁴

Dalam merespon aksi-aksi buruh tersebut pemerintah kolonial mengadakan peraturan “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura” yang diharapkan menjadi perantara bila terjadi perselisihan industrial. Namun kemudian pemerintah kolonial merasakan bahwa pemogokan mempunyai tujuan politik untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Untuk itu pada 10 Mei 1923 diumumkan undang-undang larangan mogok yang dikenal dengan artikel 161 bis. Mengam artikel 161 bis dikeluarkan sebagai respon terhadap pemogokan VSTP.

Namun artikel ini bukan alat ampuh menyetop pemogokan. Pemogokan di perusahaan percetakan di Semarang terjadi pada 21 Juli 1925. Menyusul pemogokan di C.B.Z. pada 1 Agustus 1925; diikuti dengan pemogokan di Stoomboot en Prauwenveer yang diikuti sekitar 1.000 anggota yang berakhir pada September 1925. Percetakan *Van Dorp* di Surabaya juga mengalami pemogokan pada 1 September; sedang pada 5 Oktober dan 9 Nopember pemogokan terjadi di pabrik mesin *N.I. Industrie* dan *Braat*. Serikat Boeroeh Bengkel dan Elektris (SBBE) mogok pada 14 Desember 1925. Mencakup 7 pabrik mesin dan konstruksi. Penyebab pemogokan adalah *Vereeniging van Machinefabrieken* yang membawahi 7 pabrik tersebut memutuskan tidak ingin berhubungan dengan SBBE.²⁵

Pemogokan-pemogokan yang semakin menjalar tersebut direspon gubernemen dengan menerbitkan peraturan baru yang mendukung artikel 161 bis:

Dioendangkan dengan beslit radja, jaitoe tentang doea artikel No. 153 bis dan 153 ter dalem W.v.S.

153 Bis

²⁴ Sandra, 1961. *Ibid.*, hal. 31.

²⁵ Sandra, 1961. *Ibid.*, hal. 38-9.

Barang siapa, jang sengadja melahirken dengan perkata'an, toelisan atau gambar, jang bermaksoed, baik sindiran, baik tengah² atau bisa didoega-doege, mengganggoe ketentereman oemoem, baik berkehendak atau setoedjoe dengan angan-angan jang mendjatoehken atau menjerang dari kekoeasa'an di negeri Belanda atau di Indonesia, aken dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja enam tahoen atau denda oeang setinggi²nja tiga ratoes roepiah.

153 TER

Barang siapa, jang menjetoedjoei atau menjebarken dengan toelisan atau gambar, jang bermaksoed baik sindiran, tengah-tengah atau dengan perkataan lain-lain, jang bisa menjebabken kegadoehan ketenteraman oemoem, atau mendjatoehken atau menjerang kekoeasa'an jang ada di negeri Belanda atau di Indonesia, dengan bermaksoed itoe di oemoemken atau membesarken, menjebear, memberitahoeken pada oemoem atau berkata, aken dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja lima tahoen atau denda oeang setinggi-tingginja tiga ratoes roepiah.

Ini beslit radja, aken berlakoe molai tg. 1 Mei 1926.²⁶

PARTAI KOMUNIS DI [H]INDIA (PKI): Sneevliet adalah pembawa ideologi komunisme dari Nederland dan disebarkan ke Hindia Belanda. Nama lengkapnya adalah Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Sejak tahun 1902 ia sudah aktif dalam kehidupan partai politik. Waktu itu ia tergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland sampai 1909. Ketika ke luar tahun 1909, Sneevliet aktif di dunia perdagangan. Di situ ia memasuki wilayah Hindia Belanda. Tahun 1913 ia tiba di Hindia Belanda. Ia sempat bekerja di koran *Soerabajaasch Handelsblad*, Surabaya. Masih di tahun yang sama, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di perusahaan *Semarangsche Handelsvereniging*. Tahun 1914, Sneevliet mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Organisasi politik yang bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Majalah *Het Vrije Woord* menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh Belanda yang juga aktif membantu Sneevliet

²⁶ "Mei 1923 artikel 161 Bis, Mei 1926 artikel 153 Bis dan 153 TER," *Si Tetap*, No. 4-5, April dan Mei 1926.

adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Bumiputera ada nama-nama Semaoen, Alimin dan Darsono, yang adalah juga buruh-buruh kereta api dan trem yang bernaung di bawah VTSP.

Semula Semaoen, Darsono dan Alimin adalah pengikut H.O.S. Tjokroaminoto. Mereka terdaftar sebagai anggota Central Sarekat Islam (CSI), di Surabaya, sejak 1915. Setelah cukup dekat dengan Sneevliet, ketiganya memutuskan pindah ke Semarang. Tempat di mana Sneevliet mendirikan ISDV.

Pecahnya Revolusi Sosialis/Komunis pada bulan Oktober 1917 di Rusia, bagaimanapun, berpengaruh pada aktivitas politik kaum pergerakan Hindia Belanda. Kemenangan Revolusi Oktober di Rusia itu telah membangkitkan kesadaran komunisme. Revolusi Oktober memberi inspirasi bahwa imperialisme Belanda pasti dapat digulingkan, dan rakyat bumiputera akan dapat mendirikan negara yang bebas dan merdeka.²⁷

Di Semarang, Semaoen dkk. menjadi pimpinan SI lokal. Karena sikap dan prinsip komunisme mereka yang semakin radikal, hubungan dengan anggota SI lainnya mulai renggang.

Kongres Nasional Sarekat Islam ke-2 di Jakarta yang diselenggarakan dari tanggal 20 hingga 27 Oktober 1917. Membahas hubungan antara agama, kekuasaan dan kapitalisme. Tema yang menimbulkan perdebatan keras dan kerenggangan (perpecahan) di dalam SI.

Pasca Kongres, SI Semarang mulai mengadakan aksi-aksi untuk memperjuangkan cita-citanya. Desember tahun itu juga SI Semarang mengadakan rapat anggota dan menyerang ketidakberesan di tanah-tanah partikular.²⁸ Juga kaum buruh diorganisasi supaya lebih militan dan mengadakan pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan yang sewenang-wenang. Korban pertama pemogokan ini adalah sebuah perusahaan mebel yang memecat 15 orang buruhnya. Atas nama SI, Semaoen dan Kadarisman mempro-lamasikan pemogokan dan menuntut 3 hal.

²⁷ Depagitprop CC PKI, 1958, *Apa Partai Komunis Itu*, diktat untuk KPS dan KPSS tentang "Pembangunan Partai," Djakarta.

²⁸ *Sinar Djawa*, 24 Desember 1917.

Pertama, pengurangan jam kerja dari 8,5 jam menjadi 8 jam. Kedua, selama mogok, gaji dibayar penuh dan ketiga, setiap yang dipecat, diberi uang pesangon 3 bulan gaji. Dalam proklamasi pemogokan itu, mahalnya biaya hidup, juga digugat.²⁹ Pemogokan ini ternyata merupakan senjata yang ampuh. Dalam waktu 5 hari saja, majikan menerima tuntutan SI Semarang dan pemogokan pun dihentikan.

Saat Kongres ketiga di Bandung, Semaoen dengan lantang dan terang-terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI. SI akhirnya benar-benar pecah menjadi SI Putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdul Muis. Di sisi lain ada SI Merah —sejak 1924 menjadi Sarekat Rakyat (SR)—yang dipimpin Semaoen dan teman-temannya. Sneevliet dan teman-teman Belandanya memperluas pengaruh mereka ke kalangan yang memiliki posisi penting. Militer yang waktu itu personilnya sekitar 25.000 termasuk yang diincar Sneevliet. Yang ‘digarap’ Sneevliet adalah serdadu-serdadu angkatan darat. Angkatan laut digarap Brandsterder. Semaoen, Darsono dan Alimin melakukan propaganda ke kalangan rakyat yang menjadi anggota SI. Pemerintah Hindia Belanda yang mulai mengendus gelagat ISDV dengan propaganda komunisnya, menangkap Sneevliet dan mengusirnya dari Hindia Belanda.

23 Mei 1920 Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia.³⁰ Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya

²⁹ *Sinar Djawa*, 6 Februari 1917.

³⁰ Pada awal 1920 ISDV menerima surat dari *Haring* (nama samaran Sneevliet) dari Shanghai (Canton), yang menganjurkan agar ISDV menjadi anggota Komintern. Untuk itu harus dipenuhi 21 syarat, antara lain memakai nama partai komunis serta menyebut nama negara. Semaoen lalu mengirimkan tembusan surat ini kepada tokoh-tokoh ISDV, termasuk Darsono yang waktu itu masih ada di penjara Surabaya. Dalam suatu pertemuan dengan Hertog di penjara Surabaya, Darsono menyatakan setuju dengan menambahkan 2 alasan lagi:

1. Manifest yang ditulis Marx-Engels dinamai Manifest Komunis dan bukannya Manifest Sosial Demokrat.
2. Rakyat Indonesia tidak dapat membedakan antara ISDV yang revolusioner dengan ISDP yang evolusioner.

Untuk penjelasan ini lihat: Soe Hok Gie, 1999. *Di Bawah Lentera Merah*, khususnya bab IV “Dari Kongres Nasional CSI ke-3 Sampai PKI,” Yayasan Benteng Budaya, Februari.

menjadi Partai Komunis Indonesia. Ketuanya: Semaoen.

Tokoh kiri yang tidak kalah peranannya adalah Tan Malaka. Ia lahir di Gadang, Sumatera Barat. Saat berumur 16 tahun, Tan dikirim ke Nederland. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru di sebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menggugah semangat radikal Tan muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaoen. Oleh Semaoen, ia diminta untuk membina dan mengajarkan komunisme ke generasi muda setempat di sebuah sekolah. Sekolah ini kemudian diberi nama 'Sekolah Tan Malaka'. Siswa yang dianggap berprestasi akan direkomendasikan menjadi pengurus PKI. Di saat-saat tidak belajar para siswa ditugaskan untuk melakukan propaganda di kampung-kampung. Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Hindia Belanda dan mengembara ke Berlin, Moskow dan Nederland.

PKI juga melakukan agitasi menggunakan media massa. Tak sedikit media Islam adalah pula media komunis. Seperti dapat dijumpai di Semarang: *Sinar Hindia*; *Soeara Ra'jat*; *Si Tetap*; dan *Barisan Moeda*; di Surakarta (Solo) antara lain *Islam Bergerak*; *Medan Moeslimin*; *Persatuan Ra'jat Senopati*; dan *Hobromarkoto Mowo*; di Surabaya ada *Proletar*, di Yogyakarta terkenal dengan *Kromo Mardiko* dan di Bandung dengan *Matahari*; *Mataram*, *Soerapati* dan *Titar*; di Jakarta ada dua yaitu *Njala* dan *Kijahi Djagoer*. Dalam bahasa Mas Marco Kartodikromo, saat pergerakan masih berusia muda, di tahun 1918:

kita memberi ingat kepada saudara-saudara, djanganlah soeka membatja sembarang soerat kabar, pilihlah soerat kabar jang betoel-betoel memihak kepada kamoer orang, tetapi jang tidak memihak kepada kaoem oeang Sebab kalau tidak begitoe, soedah boleh ditentoekan, achirnja kita orang Hindia tentoe akan terdjeroemoes di dalam lobang kesengsara'an jang amat hina sekali.³¹

Sedang Moeso memberi penjelasan cukup tajam tentang peranan

³¹ Marco, "Djangan Takoet," *Sinar Djawa*, Kamis 11 April 1918, No. 82.

berbagai terbitan tersebut:

Kaoem tertindas disini haroeslah membuatja boekoe-boekoenja sendiri jang ditoelis oleh orang-orang dari klasnja sendiri. Begitoelah klas jang tertindas, disini nanti djadi insjaf betoel akan nasibnja.

Apabila pikiran klas jang tertindas lepas dari pengaroeh klas kapital, akan lekaslah ia mengoeatkan barisannja dan akan lekas djoega ia menggalang barisannja oentoek mereboet apa jang dipandangnja baik bagi diri sendiri.

Apakah jang dipandang baik oleh klas jang tertindas selain djatoehnja kapital, karena djatoehnja kapital menimboelkan kommoenisme, jaitoe doenia jang selamat itoe, dimana semoea pendoeoek negeri bisa hidoep roekoen bersaudara'an dengan tidak kekoerangan sesoeatoe apa.

Oentoek mentjepatkan datangnja kemerdekaan kita, haroeslah sekalian saudara membuatja boekoe-boekoenja sendiri, jang ditoelis oleh orang-orang dari klasnja sendiri.

Klas jang tertindas haroes menerbitkan boekoe-boekoe jang perloe dalam pertandingan melawan kapital.³²

Pada Kongres PKI tanggal 11-17 Desember 1924 di Kota Gede Yogyakarta, dibicarakan tentang rencana gerakan secara serentak di seluruh Hindia Belanda. Muncul Alirahman yang mengusulkan diadakan gerakan revolusioner dengan membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Usul tersebut kurang disambut pimpinan PKI saat itu: Darsono. Memang, dibanding rekan seangkatannya Semaoen, Darsono tergolong lunak. Dia tidak pernah menginginkan terjadinya pertumpahan darah, atau penggunaan bom, teror dan tindakan keras lainnya.

Ketika para pendiri PKI seperti Darsono, Semaoen dan Alimin sudah 'henggang' ke luar negeri, pimpinan pimpinan PKI pusat maupun daerah menjadi lebih radikal dan melakukan pemberontakan di berbagai tempat di Jawa.

Pemberontakan 1926: Saat itu yang menjadi Gubernur Jenderal

³² Moeso, "Boekoe-Boekoenja Sendiri, pikiran-pikiran sendiri, Moraal Sendiri," *Proletar*, 23 Juli 1925, nomer 87 taohen ke 43.

adalah Van Limburg Stirum. Yang menjadi ketua Serikat Islam Merah sekaligus PKI adalah: Moeso. Dalam propaganda, PKI di bawah Moeso selalu aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. Lalu pemilik rumah diminta membeli karcis merah seharga setalen. Ada juga yang harganya satu setengah *gulden*. Mereka yang telah membeli karcis ditunjuk untuk melakukan huru-hara tanggal 12 dan 13 November 1926. Penjara Glodok dan Salemba termasuk yang diserang. Rumah Gubernur Jendral Van Limburg juga diserang. Pada hari yang sama, di tempat lain, seperti Banten, terjadi hal serupa. Di Banten berlangsung sampai 5 Desember. Di Bandung sampai 18 November, Kediri sampai 15 Desember. Rencananya akan terjadi juga pemberontakan di Banyumas, Pekalongan dan Kedu. Namun gagal, tidak diketahui penyebab kegagalannya.

Orang-orang PKI melakukan serangkaian perusakan. Kantor telepon dan telegraf diserang. Rel kereta api di Banten dibongkar. Pemberontakan meluas juga sampai ke Padang dan Padang Panjang. Dari kalangan militer yang terlibat tertangkap Wuntu, seorang serdadu Menado. Saat itu ia dan lima orang rekannya hendak merampas sebuah bengkel di Bandung.

Pemerintah Hindia Belanda langsung mengambil tindakan tegas. Tanggal 1 Desember 1926, sebanyak 106 pemegang karcis merah dari Tanah Abang dan Karet digiring ke kantor Kabupaten di daerah *Molenvliet* (sekarang Gambir).

Gembong-gembong PKI yang sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum pemberontakan meletus adalah Darsono, Alirahman dan Mardjohan. Sedangkan Alimin, pendiri PKI, dan Moeso sudah lebih awal lari ke Rusia (sebelumnya ia berada di Singapura).

Adapun Semaoen yang diasingkan dari Hindia Belanda sempat mampir ke Leiden, Belanda. Di sana ia ikut dalam *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia—PI)-nya Mohammad Hatta dan Ahmad Subardjo. Karenanya pemerintah Belanda sempat menghubungkan-hubungkan peristiwa yang terjadi di Jawa dengan PI. Bahkan Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo dan kawan-kawannya sempat ditangkap dan diinterogasi. Tapi karena tidak terbukti ikut dalam gerakan komunis, mereka dilepas kembali.

Mengenai pemberontakan PKI tahun 1926 ini, ada versi lain yang ditulis oleh Hatta. Dalam memoarnya ia menulis rencana pemberontakan itu sempat diperdebatkan di kalangan pengurus PKI. Semuanya setuju ada pemberontakan, kecuali Tan Malaka. Akhirnya, diutus Alimin dan Moeso untuk meminta pendapat ke pihak Moskow. Mereka tidak mendapat persetujuan, mereka disalahkan oleh Stalin. Kemudian mereka pulang ke Hindia Belanda dengan maksud membatalkan rencana pemberontakan itu. Belum sampai ke dua utusan tadi di Hindia Belanda, pemberontakan sudah meletus.

Setelah kegagalan PKI tahun 1926, Semaoen sempat bertemu dengan Hatta di Den Haag. Akhirnya kedua tokoh yang berbeda prinsip ini menyetujui konvensi 4 pasal. Belakangan konvensi itu malah merugikan kedua belah pihak. Hatta ditangkap dengan tuduhan mendirikan organisasi terlarang. Tapi melalui proses peradilan, Hatta dilepaskan. Sedangkan bagi Semaoen, konvensi ini ternyata tidak disetujui Stalin. Semaoen menjadi kurang disukai Stalin. Dengan menandatangani konvensi ini Semaoen telah menempatkan gerakan komunis berada di bawah gerakan nasionalis. Ia diperintahkan untuk membatalkan konvensi itu dihadapan pers internasional. Ia melakukan hal tersebut. Setelah itu ia dibuang ke Semenanjung Krim.

Pemberontakan 1926 dapat dipatahkan. Terjadi pelemahan besar-besaran gerakan buruh. 4.500 buruh dan aktivis kiri dijebloskan ke penjara, 1.300 dibuang ke *Boven Digoel* (Tanah Merah), 4 dihukum mati. Jumlah yang dideportasi ke *Boven Digoel*:

“Pada penghabisan Maret 1928 (jadi tidak termasuk orang-orang yang masih dalam pendjara) banjaknja orang jang diinternir di sana ada 823, diantaranya 15 orang perempuan dan 10 orang Tionghoa, diantaranya 629 dari Djawa, 77 dari Sumatera dan 33 dari Maluku; diantaranya 9 berumur kurang dari 20 tahun, 422 berumur 20-29 tahun, 81 berumur 40-49 tahun, diantaranya 383 pegawai rendah, 79 petani, 361 guru, supir dan pedagang kecil”³³

Pemberontakan 1926 menunjukkan kuatnya keinginan kaum bumiputera untuk merdeka dari Negara Kolonial Hindia Belanda.

³³ A.M. Pringgodigdo. 1967. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Dian Rakjat, Djakarta, hal. 32.

Hal ini mendorong suatu arus konservatif yang menolak keinginan merdeka tersebut. Tampil *Vaderlandsche Club (VC)* yang bertujuan memperjuangkan stabilisasi masyarakat Hindia Belanda dengan menolak upaya untuk berdiri sendiri.³⁴ Kemudian juga didirikan *Stuwgroep* dan gagasan-gagasan masyarakat persemakmuran Hindia (*Indische Gemeene-best*) pun mulai dikumandangkan.³⁵

Sejak pematahan gerakan buruh di tahun 1926-27 tersebut, aktivitas politik buruh sangat melemah. Pemerintah kolonial sebetulnya menjadi sangat reaksioner jauh sebelum pemberontakan terjadi. Peristiwa Perang Dunia I (1914-1918) telah begitu memukul industri dan perdagangan. Krisis perusahaan gula terjadi sejak 1918, dan krisis ekonomi akhirnya dihadapi sejak 1921. Aksi-aksi pemogokan yang mulai besar seperti Januari 1922 di lingkungan pegadaian, atau aksi pada Mei 1923 di lingkungan pegawai kereta-api, telah mendorong pencabutan hak berkumpul dan berapat. Diikuti dengan PHK sekitar 1.000 buruh di Yogyakarta.

Memang ada upaya untuk membangun kembali gerakan buruh pasca 1926. Pada Juli 1927 di Bandung dibentuk *Persatoean Beambte Spoor en Tram (PBST)*. Di Jakarta terbentuk satu federasi dari kalangan guru seperti *Hogere Kweekscholieren Bond (HKSB)*, *Perserikatan Normaal School (PNS)*, *Persatoean School Opziener (PSO)*, *Kweekschool Bond (KB)* dst. Pebruari 1930 di Yogyakarta didirikan *Persatoean Vakbonden Pegawai Negeri (PPVN)* oleh Soeroso. Hindromartono (seorang pengacara) tahun 1938 mendirikan *Barisan Kaoem Boeroeh*.

Sutan Sjahrir (PNI-Baru) di tahun 1934 menerbitkan pamflet *Pengerakan Sekerdja*. Buku ini adalah hasil ceramah di depan *Persatoean Boeroeh Kereta Api Indonesia*. Sjahrir menjelaskan tentang “nilai lebih,” “upah nominal-upah riil,” ini semua guna membangkitkan kembali gerakan buruh.

Dr. Soetomo, di Surabaya, membentuk *Serikat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI)* pada 8 Juli 1928. Organisasi ini hanya berumur

³⁴ *Algemeen Landbouw Weekblad*, 1928, hal. 1316-1317.

³⁵ Sartono Kartodirdjo dkk., 1976, *Sejarah Nasional Indonesia (SNI)*, jilid V, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.71.

1 tahun disebabkan pada 1 April 1929 menggabungkan diri dengan “Liga menentang kolonialisme serta penindasan” yang merupakan jelmaan Internationale III yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, sehingga akhirnya SKBI dibubarkan.

Soetomo juga menjadi ketua Pelita Boeroeh Indonesia (di Surabaya) dan menerbitkan tulisannya *Soeloeh Sarekat Sekerdja* (1934). Karya Soetomo ini berpengaruh di kalangan pegawai kereta-api, khususnya dalam mempersoalkan gaji/upah. Soetomo mendukung organisasi seperti Persatoean Serekat Sekerdja Indonesia, didirikan pada Mei 1930, yang menurut dia tidak berkaitan dengan partai politik dan agama.

Yang perlu digaris-bawahi dari gagasan Soetomo adalah dia menggeser gagasan serikat buruh menjadi serikat sekerja:

“Dengan adanya beberapa perkoempoelan kaoem sekerdja jang berlainan azaznja itoe, maka didalam prakteknja, masing-masing perkoempoelan itu hanja melemahkan kekuatan kaoem boeroeh belaka... Karena itoelah, hendaknja kaoem boeroeh itoe mempoenjai perkoempoelan jang toenggjal azasnja, soepaja moedah mentjetak persatoeannja.”³⁶

Di sini gagasan asas tunggal muncul. Bahkan lebih jauh Soetomo menyatakan bahwa pergerakan kaum buruh harus dipisahkan dari aksi politik. Buruh harus bersatu terlebih dahulu.

Dalam kondisi lemah tersebut ada inisiatif membentuk partai politik buruh. Pada 7 Oktober 1938 di Jakarta berdiri Indische Partij van Werknemers. Namun pembentukan partai ini pun tidak membantu ke arah lebih baik.

Gabungan Serikat-serikat Sekerdja Partikelir Indonesia (GASPI) yang diketuai Muhamad Ali dan berpusat di kota Semarang mengadakan konperensi pada 26-27 Juli 1941. Hadir 7 pengurus besar, 22 organisasi setempat dan 2 GASPI lokal. Konperensi menghasilkan resolusi yaitu seruan kepada pemerintah agar memberi kedudukan dan hak turut mengatur bagi serikat sekerja dalam menyiapkan penghargaan terhadap pegawai perusahaan. Resolusi itu diambil karena adanya pertimbangan bahwa semangat damai dalam perusahaan dan kesejahteraan masyarakat

³⁶ Soetomo, 1934, *Soeloeh Sarekat Sekerdja*, hal. 13-14.

membutuhkan organisasi buruh yang sehat dan kuat serta pemberian hak kepada buruh “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti.”³⁷

Perang Dunia II pecah. 8 Desember 1941 Pemerintah Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Dapat dikatakan sejak itu aktivitas politik buruh mati. Jepang masuk dan menduduki Hindia Belanda. Dicanangkan ekonomi perang. Aktivitas politik bmmputera mati.

STATISTIK PERBURUHAN SEJAMAN³⁸

Menurut perhitungan tahun 1930 (statistik Hindia Belanda), penduduk Indonesia yang hidup dari upah berjumlah lebih kurang 6.000.000 (enam juta). Jumlah ini termasuk buruh musiman (*seizoen arbeiders*) yang sangat besar jumlahnya dan bekerja di perkebunan atau pabrik gula. Buruh musiman ini umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin, yaitu penduduk desa yang sama sekali tidak mempunyai tanah garapan atau mempunyai tanah tetapi sangat sempit. Di antara 6 juta kaum buruh itu, antara lain terdapat setengah juta buruh modern terdiri dari:

Sektor	Jumlah buruh
Transportasi	316.200
Pabrik dan bengkel	153.100
Tambang timah milik pemerintah dan swasta	36.400
tambang batubara milik pemerintah dan swasta	17.100
tambang minyak	29.000
tambang emas dan perak milik pemerintah dan swasta	6.000

Lainnya adalah buruh pabrik gula, buruh perkebunan, berbagai golongan pegawai negeri (termasuk polisi dan tentara), buruh industri kecil, buruh lepas dsb. Perlu dijelaskan bahwa yang terbesar adalah jumlah buruh industri kecil (2.208.900) dan buruh lepas (2.003.200). Dari angka-angka ini jelas bahwa baru sebagian kecil

³⁷ Sandra, 1961. *op. cit.*, hal. 57-59.

³⁸ Untuk bagian ini fakta-fakta diambil dari *Kewadajiban Front Persatuan Buruh*, 1952, Resolusi Central Komite Partai Komunis Indonesia, Jajasan “Pembaruan,” Djakarta.

buruh Hindia Belanda (setengah juta) yang berhubungan dengan alat-alat produksi modern, mayoritas bahkan masih berkaitan erat dengan pertanian.

Pemerintah Hindia Belanda telah sangat menekan perkembangan gerakan buruh. Statistik tahun 1940 menunjukkan, bahwa hanya 110.370 yang terorganisasi—dalam 77 serikat buruh. 77 serikat buruh itu bergabung dalam 11 gabungan serikat buruh (federasi).

Dalam tahun 1940 di Hindia Belanda terjadi pemogokan di 42 perusahaan—diantaranya 30 perusahaan tekstil di Jawa Barat—melibatkan 2.115 buruh. Jumlah buruh dari 42 perusahaan itu adalah: 7.949.

Menurut statistik tahun 1940, rata-rata upah buruh pabrik gula Rp. 0.28/hari untuk buruh laki-laki dan Rp. 0.23/hari untuk perempuan. Dalam tahun 1940 tercatat 407 pengaduan buruh yang mendapat pukulan dari administratur, asisten-asisten dan mandor-mandor perkebunan. Kejengkelan buruh perkebunan terhadap perlakuan tersebut dinyatakan dengan serangan-serangan buruh perkebunan pada para pengawas perkebunan. Dalam tahun 1940 tercatat 51 serangan buruh perkebunan atas pengawas perkebunan, 2 pengawas tewas karena serangan tersebut.³⁹

INDONESIA JAMAN REVOLOESI S/D DEMOKRASI TERPIMPIN (KURUN SOEKARNO)

Dalam tahun 1935 PKI dibangun kembali secara *illegal* atas inisiatif Musso. Selanjutnya PKI ilegal ini melakukan perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang (1942-1945).

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Moh. Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

PKI Moeso terus berjalan hingga sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di luar PKI Moeso yang ilegal, muncul inisiatif membentuk kelompok Marxis-Leninis yang legal, seperti didirikan Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia (PBI) jang

³⁹ *Ibid.*

kemudian mengadakan fusi dengan Partai Rakjat Sosialis-nya Sutan Sjahrir dan menjelma menjadi Partai Sosialis. Kaum pergerakan kiri banyak terlibat di Badan Pekerdja KNIP.

Perkembangan seperti itu, menurut Moeso, membuat kedudukan dan peranan PKI sebagai partai klas buruh dan pelopor revolusi telah mengecil. Adanya tiga partai klas buruh (PKI Joesoef, PBI dan Partai Sosialis), yang mengakui Marxisme-Leninisme dan tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat (FDR),⁴⁰ dibentuk 28 Juni 1948, telah mengakibatkan ruwetnya gerakan buruh. Joesoef yang mendirikan PKI di luar PKI Moeso yang ilegal semakin memperlemah gerakan komunisme.

Bersandar pada Lenin yang meletakkan Komunis sebagai pemimpin gerakan buruh (serikat buruh), sedang serikat buruh dipahami sebagai sekolah untuk komunisme. Melalaikan propaganda komunisme di kalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sadarnya kaum buruh sebagai pemimpin Revolusi Nasional jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

PKI Moeso memperhatikan adanya keruwetan dan kekacauan, dan berusaha mencari jalan untuk ke luar dari jurang reformisme dengan mengadakan kritik dan *self*-kritik, terutama dalam rapat pleno CC PKI 10-11 Juni 1948 dan dalam rapat Polit-Biro 2 Juli 1948. Semua anggota Polit-Biro mengakui kesalahan-kesalahannya dengan terus-terang dan akan memperbaiki secepatnya. Rapat Polit-Biro PKI memutuskan untuk mengadakan perubahan jang radikal, yang bertujuan supaya:

1. Selekas-lekasnja mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor klas buruh.
2. Selekas-lekasnja mengembalikan tradisi PKI jang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II.
3. PKI mendapat hegemoni (kekuasaan jang terbesar) dalam pimpinan Revolusi Nasional ini.

Jalan yang dipilih adalah mengadakan hanya 1 partai yang legal dari klas buruh. Ini berarti dihapuskannya pimpinan PKI yang illegal. PKI jang dibangun kembali oleh Moeso secara illegal

⁴⁰ FDR terdiri dari Partai Sosialis (Kelompok Amir Sjarifuddin), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI dan SOBSI.

pada tahun 1935 digantikan oleh PKI baru. PKI baru ini dibangun oleh Moeso dengan Pamudji, Sukajat, Abdul Aziz, Abdul Rachim, Djokosudjono, Achmad Sumadi, Ruskak, Marsaid, dan dilanjutkan oleh Amir Sjarifuddin, Wikana, Sudisman, Sardjono, Subijanto, Sutrisno, Aidit dsb.⁴¹

PKI/FDR kemudian melakukan Proklamasi Madiun (dan Pati) pada 18 September 1948 yang berakibat terjadi pembantaian terhadap anggota-anggota organisasi ini oleh Pemerintah RI.⁴² Meskipun demikian anggota-anggota yang selamat dari pembantaian di awal 1950 menjalankan kembali PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit.

15 September 1945 di Jakarta didirikan Barisan Buruh Indonesia (BBI). Pidato pendirian BBI menegaskan:

“Tjepatnja perubahan masjarakat pada soal sekarang menjebabkan kita kaum buruh mengutamakan pembentukan Barisan Buruh, supaja nantinja memudahkan Serikat Sekerdja dan Partai Buruh.”⁴³

⁴¹ *Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*, Rentjana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konperensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948, Tjetakan ke-VII, Jajasan “Pembaruan” Djakarta 1953.

⁴² Dalam buku-buku sejarah yang ditulis di masa Orde Baru, Proklamasi Madiun ini dikategorikan sebagai pemberontakan. Ini tidak tepat. Alasannya *pertama*, pada masa tersebut belum tumbuh ‘persatuan’ sehingga muncul banyak inisiatif membentuk daerah/wilayah sendiri-sendiri yang sebetulnya lebih merupakan gagasan memerdekakan diri dari ‘Pusat.’ Misalnya, ada inisiatif mendirikan “Negara Sumatera Timur,” “Negara Jawa Barat” (Pasundan), “Negara Jawa Timur,” “Negara Madura,” “Dewan Federal Borneo Tenggara” dan “Daerah Istimewa Borneo Barat,” “Negara Indonesia Timur.” Dengan demikian proklamasi menjadi kebutuhan politik lokal, meskipun motivator bisa datang dari Van Mook, misalnya, yang mendapat label sebagai pembentuk “negara boneka” untuk memecah belah Negara Indonesia. Kenyataan ini pula yang akhirnya harus diakomodir oleh Soekarno menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di akhir tahun 1949. *Kedua*, yang dilakukan FDR di Madiun hanya sebatas membacakan pernyataan sikap, bukan melakukan penyerbuan dan pembunuhan. Bahkan ketika itu tidak ada seorangpun yang terbunuh/dibunuh. Pembunuhan baru terjadi ketika Gatot Subroto diminta melakukan pengganyangan terhadap aktor Proklamasi Madiun tersebut oleh Moh. Hatta. Usia RIS memang singkat karena di tahun 1950 Indonesia disatukan kembali. Namun upaya menyatukan Indonesia tersebut menimbulkan penentangan-penentangan baru seperti munculnya pemberontakan Andi Azis, DI/TII, Kartosoewirjo dsb. yang notabene adalah kalangan militer.

BBI pada 7 Nopember 1945 mengadakan kongres buruh di Solo. Berhubung pada kongres tersebut juga hadir wakil petani maka kongres berakhir dengan dileburnya BBI ke dalam Partai Buruh Indonesia (PBI) dengan kedudukan di Surabaya. Namun dalam konperensi PBI pada 31 Desember 1945 di Blitar diputuskan BBI dihidupkan kembali. Kemudian pula dalam menghadapi tentara-tentara Inggris (dan Belanda) dibentuk pula Lasjkar Buruh Indonesia (LBI) (buruh bersenjata), organisasi yang lepas dari BBI. Dan untuk membangun kesadaran organisasi di kalangan perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW) dengan ketuanya Trimurti. Dalam Kongres di Madiun tahun 1946 BBI diganti dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI).

Sebagian dari PBI memisahkan diri dan membentuk Partai Buruh Merdeka (PBM). Ketika PBI dikemudian hari bergabung dengan PKI, PBM mengubah nama menjadi Partai Murba.⁴⁴

SENTRAL ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA (SOBSI), didirikan 29 November 1946, adalah organisasi buruh yang merupakan gabungan antara Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI) dan gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV). Ketuanya Njono, Nardjoko sebagai wakil, sedang Sekjen adalah D.S. Atma.

Dalam perkembangannya di tahun 1950-an SOBSI menjadi organisasi terbesar pada jamannya. Beranggotakan 2,5 juta orang, dari 34 serikat buruh. Serikat-serikat buruh/sekerja non *vakcentraal* mendukung kelangsungan SOBSI. Mereka adalah: Serikat Buruh Bea dan Tjukai (SBBT), Serikat Buruh Djawatan Pertanian Rakjat (SBDPR), Serikat Buruh Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan (SBPPK), Serikat Buruh Garam dan Soda Negeri (SBGSN), Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI), Organisasi Buruh Umum (ORBU), Serikat Buruh Kechewanan, Serikat Buruh Kantor Urusan Gerakan Tani (SBKUGT), Serikat Sekerdja Kabinet Perdana Menteri (SSKPM), Serikat Sekerdja Bank Rakjat Indonesia (SSBRI), Gabungan Buruh Indonesia (GBI), Serikat Buruh Biro Rekonstruksi Nasional (SBBRN), Persatuan Guru Teknik

⁴³ Sandra, 1961. *op. cit.*, hal. 66.

⁴⁴ Suri Suroto, 1983, "Gerakan Buruh dan Permasalahannya," *Prisma*, nomor 11. hal 29.

Indonesia (PGTI), Serikat Buruh Pekabaran Antara, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI), Persatuan Djuru Kesehatan Seluruh Indonesia (PDKI), Serikat Buruh Pos Telegrap Telepon dan Radio (SB Postel), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelajaran (SBPP), Serikat Buruh Angkatan Udara (SERBAUD).⁴⁵ SOBSI menerbitkan *Bendera Buruh*. SOBSI juga terlibat dalam Proklamasi Madiun 1948.

Relasi antara SOBSI dengan PKI bukan afiliasi. Di PKI dikembangkan relasi keanggotaan yaitu siapa pun yang duduk dalam Politbiro adalah mereka yang berposisi pimpinan di dalam organisasi serikat, *vakcentral*, dan organisasi-organisasi massa. Dengan demikian berbagai program yang diputuskan dalam rapat-rapat Politbiro PKI pun dapat saja kemudian menjadi kebijakan serikat, *vakcentral* dsb.⁴⁶

Di tahun 1946, sekelompok orang yang tidak setuju SOBSI—setelah menerima Persetujuan Linggarjati—memisahkan diri dari SOBSI dan membentuk Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI). GASBRI pada Juli 1950 membentuk Badan Permusyawaratan Buruh (BPB). Dalam Kongres buruh tahun 1951 di mana pengaruh Partai Murba mulai masuk, dibentuk *vakcentraal* baru bernama Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI). Kiprah *vakcentraal* non SOBSI pada tahun-tahun tersebut mulai mendukung ‘pemagaran’ peran pegawai negeri menjadi di luar buruh. PP No. 31/1954 membatasi pengertian buruh hanya pada tenaga kerja perusahaan swasta yang mempunyai hubungan kerja bersifat perdata. Tenaga kerja pemerintah adalah pegawai atau karyawan yang dibayar dengan Anggaran Belanja Negara, dan hubungan kerjanya bersifat publik.⁴⁷

Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI) dibentuk 17 Februari 1947. Aktivitas mereka mendapat dukungan luas seperti

⁴⁵ Disarikan dari laporan “Kongres-Nasional Sobsi ke II tg. 9 s/d 20 Djanuri 1955 di Djakarta.” 1955. *Suara Buruh PTT*. Diterbitkan oleh Pengurus Besar SB. Postel, tahun ke X, Djan-Febr. Hal. 3-24.

⁴⁶ Terima kasih untuk Bapak Oey Haydjoen yang mengingatkan penulis tentang konstruksi relasi ini.

⁴⁷ Suri Suroto, 1983, *loc.cit.* Khususnya catatan kaki nomor 26. Hal 30.

dari SOBSI, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), BKS, Serikat Sekerja Peridar. Mereka menerbitkan *Warta Sarbupri*.

Serikat Buruh Rokok Kudus (SBRK) didirikan tahun 1946. SBRK hilang setelah peristiwa Madiun 1948. Banyak pemimpin SBRK yang terbunuh dan sebagian menghilang. Serikat Buruh Rokok Indonesia (SBRI) terbentuk tahun 1953. Mereka mengorganisir buruh pabrik-pabrik rokok Surabaya, Kudus, Semarang. SBRI kemudian bergabung dengan SOBSI.⁴⁸

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo pada tanggal 4 September 1949 mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku yang terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 tidak akan dituntut, kecuali bila mereka terlibat tindakan kriminal. Keputusan tersebut diterima oleh kabinet pada tanggal 7 September 1949.⁴⁹ Selain itu pada 21 Agustus 1950 Presiden Soekarno dalam rangka pembentukan kabinet mengundang partai-partai kiri, mereka adalah PKI, PBI, SOBSI, BTI, Partai Murba dan Partai Sosialis. Agenda membicarakan keikutsertaan partai-partai dalam kabinet, calon-calon perdana menteri (PM) yang mereka usulkan dan syarat-syaratnya serta program-program yang harus dilaksanakan.⁵⁰

Alimin Prawirodirdjo yang muncul kembali pada September 1949 adalah penginisiatif pembentukan PKI pasca Madiun 1948. Pada 10 Juni 1950 dia mulai menyusun Central Komite (CC) terdiri Sudisman (mantan sekjen Pesindo), Djaetun (mantan Boven Digoel) dan Ngadiman. Bulan Juli muncul D.N. Aidit dan M.H. Lukman yang bergabung juga. Kemunculan dua terakhir tersebut menciptakan friksi ke dalam, muncul pandangan berbeda antara golongan tua (Alimin) yang hanya ingin membatasi aktivitas pada

⁴⁸ Lance Castles, 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Sinar Harapan, hal. 133-4.

⁴⁹ Subhan Sd., 1999, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Benteng Budaya, Cetakan ke-2, Februari, hal. 11.

⁵⁰ Subhan Sd., 1999, *Ibid.*, hal. 13. Dalam pertemuan tersebut PKI mengutus Ngadiman Hardjosubroto, Hutomo Supardan, Djaetun Dirdjowijoto dan Achmad Sumadi. Mereka mengajukan bahwa kabinet harus bertanggungjawab penuh terhadap parlemen.

pembentukan kader, dan golongan muda (Aidit) yang menginginkan pembangunan kerjasama luas melalui front nasional. 7 Januari 1951 terjadi suksesi, Alimin digantikan Aidit. Susunan politbiro baru adalah Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Alimin. Strategi yang diambil Aidit adalah front nasional. Meskipun di awal gagasan ini banyak ditentang oleh anggota politbiro yang lain, namun di dalam perjalanan PKI strategi ini dapat mencuatkan PKI dari kelompok kecil menjadi kelompok sangat besar. Dan dalam Pemilu I tahun 1955 menjadi partai ke empat terbesar pemenang pemilu.⁵¹ PKI menerbitkan majalah (buletin) organisasi seperti *Bintang Merah*, *Harian Rakjat*, *Review of Indonesia*, *Ilmu Marxis*, *Mimbar Komunis*, *Zaman Baru*, *PKI & Perwakilan*, *Ekonomi & Masyarakat*. Dan buku-buku terjemahan karya-karya penting Karl Marx, Frederick Engels, V.I. Lenin, J.W. Stalin dsb. yang diterbitkan oleh Jajasan Pembaruan.

Di tahun 1952 Partai Nasional Indonesia (PNI) membentuk Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM); tahun 1956 Nahdatul Ulama (NU) membentuk Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi). Partai Islam PSII di tahun 1959 membentuk GOBSI. Orang-orang katolik membentuk Ikatan Buruh Pantjasila.⁵²

Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dibentuk oleh Masjumi (Majlis Sjuro Muslimin Indonesia). SBII mempunyai prinsip bahwa perjuangan buruh berbeda dengan perjuangan politik. Bila gerakan buruh berhasil memperjuangkan tuntutannya, maka yang mengenyam langsung adalah buruh bersangkutan, misalnya kenaikan upah, mendapat bonus, hadiah tunjangan dsb. SBII menyerukan kepada kaum buruh agar berpegang teguh pada persatuan dan jangan ada permusuhan antara buruh dengan majikan. Untuk itu pengurus besar SBII mengusahakan pertolongan bagi kaum buruh, baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya. Maksud dari upaya ini adalah agar lambat laun di setiap pusat buruh seperti di pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja lainnya terdapat keharmonisan.⁵³

⁵¹ Subhan Sd., 1999, *Ibid.*, hal. 24 *passim*.

⁵² Lance Castles, 1982. *Op.cit.*

⁵³ *Suara Partai Masyumi*, No. 6-7, Th. Ke VIII, 1954.

Presiden Soekarno di akhir 1959 melarang aktivitas Masyumi dan PSI karena keterlibatan mereka dalam PRRI-Permesta. Kemudian SBII melebur ke Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo). Jusuf Wibisono, salah seorang pendiri Gasbiindo, memunculkan Bahaya Merah di Indonesia dan mengusulkan pembentukan front anti komunis. Front tersebut akhirnya dibentuk bersama-sama dengan Angkatan Darat disebut Badan Kerdjasama Buruh-Militer (BKS-BuMil). BKS-BuMil membentuk jaringan sejak dari daerah hingga ke pusat. Untuk pembenaran aktivitas tersebut, kondisi sejaman ada *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB—negara dalam keadaan darurat). Gasbiindo menjadi mitra utama BKS-BuMil, dukungan Gasbiindo adalah memberi bantuan kepada penguasa perang (militer) untuk ikut menjaga dan menyelamatkan alat-alat produksi dan menjaga kelancaran jalannya produksi. Selain itu badan ini juga memberikan pertimbangan atau bantuan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan yang terjadi antara buruh-majikan agar persoalan tidak berlarut-larut.⁵⁴

Apa yang dilakukan oleh BKS-BuMil-Gasbiindo adalah mengontrol dan menghancurkan serikat-serikat buruh yang berpolitik.

Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) didirikan tahun 1961. Serikat ini disponsori oleh Angkatan Darat untuk melawan SOBSI. Beberapa perwira yang terlibat dalam pemberontakan Permesta-PRRI seperti Sumual, Lahade, Nawawi, Ahmad Hussein, M. Simbolon dan Zulkifli Lubis menjadi pejabat-pejabat SOKSI.⁵⁵ Brigjen Suhardiman, ketua SOKSI saat itu, pula berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT. PP. Berdikari.

PERSELISIHAN PERBURUHAN SEJAMAN: SARBUPRI dalam pertengahan tahun 1950 mengorganisir pemogokan diikuti sekitar 700.000 buruh perkebunan. Pemogokan raksasa ini berakhir dengan kemenangan. Mereka didukung BTI dan SOBSI.

Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) mogok menentang Gabungan Perusahaan Otobis (GAPO) dalam bulan Juli 1951. Aksi ini tidak hanya dapat simpati dan dukungan dari golongan buruh lain, tetapi juga dapat simpati dan dukungan pengusaha-pengusaha angkutan bis nasional.

⁵⁴ *Gasbiindo Soko Guru Revolusi Indonesia*, Jakarta 1964, hal. 92.

Tidak setiap pemogokan berakhir dengan kemenangan. Pemogokan buruh Cordesius di Jakarta pada awal tahun 1950, pemogokan buruh kapal dan pelabuhan di Belawan dalam tahun 1951, dsb. Pemogokan-pemogokan ini tidak memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga gagal, dan menyebabkan terisolasinya perjuangan-perjuangan buruh itu dari massa buruh lainnya dan dari rakyat banyak.

Berbagai pemogokan lain juga dilakukan oleh buruh percetakan (SBPI), buruh minyak kelapa (SARBUMIKSI), buruh gula di bawah pimpinan Serikat Buruh Gula (SBG), buruh angkutan udara (SERBAUD), buruh minjak (PERBUM). Tuntutannya beragam termasuk pula menuntut hadiah lebaran dan gratifikasi.⁵⁶

DATA STATISTIK. Perselisihan perburuhan antara 1951-1955: tercatat 11.736 kasus perselisihan, disertai 1.787 pemogokan, melibatkan 918.739 buruh. Dalam prosentase sektor perkebunan 31,23%, industri 18,64%. Antara 1956-1959 terdapat 14.003 kasus perselisihan perburuhan, disertai 631 pemogokan, melibatkan 441.900 buruh.⁵⁷

Semangat nasionalisme yang didorong terus oleh Soekarno membuat buruh merasa terdukung dalam melakukan pemogokan. Dalam rangka politik pem-bebasan Irian Barat, tanggal 2 Desember 1957 dilakukan pemogokan di perusahaan-perusahaan Belanda.

Berlanjut dengan aksi pengambilalihan perusahaan. Organisasi-organisasi serikat buruh kiri menuntut untuk diikutsertakan dalam pengelolaan perusahaan. Pemerintah mendukung keinginan tersebut dengan Pembentukan Dewan Perusahaan di tahun 1960. Buruh ditempatkan pada Badan Pertimbangan.

Ruang-ruang politik yang berhasil diraih buruh menyebabkan aksi-aksi pemogokan menjadi menyusut jumlahnya. Tahun 1960 tercatat 1.096 kasus; tahun 1961 tercatat 1.159 kasus; tahun 1962 menjadi 914 kasus; tahun 1963 menjadi 809 kasus; tahun 1964 hanya 341 kasus.⁵⁸

⁵⁵ *Sinar Harapan*, 11 Djanuari 1968.

⁵⁶ Resolusi Central Komite Partai Komunis Indonesia. 1952. *Kewadajiban Front Persatuan Buruh*. Jajasan "Pembaruan," Djakarta.

⁵⁷ Suri Suroto, 1983, *loc.cit.* Hal 31.

AKHIR MASA SOEKARNO: Jaman keemasan politik rakyat berakhir ketika pada 30 September 1965 malam, lebih tepat dini hari 1 Oktober—Soekarno menyebut Gestok bukan Gestapu—, sekelompok militer melakukan pembunuhan sejumlah Jenderal di Jakarta. Pembunuhan para jenderal ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September.⁵⁹

Kelanjutan dari peristiwa pembunuhan tersebut Letnan Jenderal Soeharto terpilih menjadi komandan Komando Pemulihan Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Soeharto, antara 1965-66, melakukan “pembersihan” politik dengan melakukan pembantaian rakyat secara besar-besaran. Dikembangkan *discourse* bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan para jenderal adalah Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Hal ini menjadi pembenaran melakukan pembantaian massal. Diduga terjadi pembunuhan rakyat antara 78 ribu (angka *fact finding commission*) sampai 3 juta orang (pengakuan almarhum Sarwo Edhi).⁶⁰ Dan, lebih dari setengah juta orang dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan.⁶¹

Berdasarkan wewenang yang bersumber dari Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden menetapkan membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk seluruh bagian organisasinya dari tingkat pusat hingga daerah, beserta seluruh organisasi yang seasas/-berlindung/bernaung di bawahnya. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin

⁵⁸ Suri Suroto, 1983, *loc.cit.* Hal 31.

⁵⁹ Meskipun sudah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa G30S adalah konflik internal dalam Angkatan Darat, namun penghembusan kembali hal tersebut oleh Kolonel Latief—setelah Soeharto *dilengserkan*—menyegarkan kembali persoalan tersebut. Namun belum ada keberanian dari penguasa-penguasa baru untuk membuka pembantaian rakyat yang terjadi pasca 30 September 1965 tersebut. (Lihat: “Setelah Napol PKI Dibebaskan Habibie, Awas PKI Bangkit Kembali,” *Forum Keadilan*, nomor 1, tahun VIII, 11 April 1999, hal.79-89.)

⁶⁰ “Pembantaian 1965,” 2002. *Diskusi Bulan Purnama, Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000*. Jaringan Kerja Budaya. Maret. Hal. 106-107.

⁶¹ Lihat *Politik Pembebasan Tapol*, 1998, YLBHI. Buku ini mencakup sejak peristiwa pembantaian 1965 hingga akhir kekuasaan Orde Baru (Soeharto) yang dialihkan ke presiden baru B.J. Habibie.

Besar Revolusi No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

MPRS mengadakan sidang Istimewa pada 7-12 Maret 1967. MPRS menghasilkan ketetapan no. XXXIII/-MPRS/1967 yang memutuskan mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Soekarno dan menarik kembali mandat serta segala kekuasaan Soekarno. Soeharto diangkat menggantikan Soekarno dalam ketetapan yang sama dengan pencabutan mandat ke Soekarno. Soeharto dilantik MPRS pada 12 Maret 1967. Ketua MPRS pada waktu itu adalah Jenderal A.H. Nasution.

INDONESIA JAMAN ORDE BARU (SOEHARTO)

Penghancuran gerakan komunis oleh militer di tahun 1965-66 mendapat respon sangat positif dari negeri-negeri imperialis. Tahun 1967 dalam pertemuan *Paris Meeting*—beranggotakan: Jepang, Jerman Barat, Australia, Amerika Serikat, Perancis, Italia, Nederland, Inggris, Swiss dan Selandia Baru—dilakukan penjadwalan hutang Indonesia sebesar US\$ 2,4 milyar—separuh adalah hutang ke negara-negara Barat, dan separuh sisanya adalah hutang ke negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Hutang tersebut sedianya harus dibayarkan pada tahun 1968, namun keputusan pertemuan tersebut menunda pembayaran hingga tahun 1972-1979. Pada 10 Januari 1967 pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing pada 19 Januari 1967. Sedang sebagai kelanjutan Pertemuan Tokyo pada bulan September 1966, di Amsterdam pada tanggal 23-24 Pebruari 1967 diselenggarakan pertemuan untuk membentuk sebuah badan pemberi pinjaman yang dikenal dengan sebutan *Inter Governmental Group for Indonesia* (IGGI). Dalam *Amsterdam Meeting* ini disepakati bantuan sebesar US\$ 325 juta kepada Indonesia.⁶²

Pinjaman dan investasi swasta asing masuk. Dibuka kawasan-kawasan industri. Hingga 1995 kawasan industri menggunakan 42.304,35 ha, perinciannya sebagai berikut:

⁶² *Berita Yudha*, "Amsterdam Meeting sepakat beri bantuan 325 djuta dollar AS kepada Indonesia," 24 November 1967.

Jumlah Kawasan Industri di Indonesia

Lokasi	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
DKI Jakarta	6	3.151,6
Jawa Barat	75	21.489,4
Jawa Tengah	15	2.891,4
Jawa Timur	29	6.035,69
Sumatera	18	6.869,24
Sulawesi	3	1.015,02
Kalimantan	6	852
J U M L A H	152	42.304,35

Sumber: Himpunan Kawasan Industri (HKI), dikutip dalam "Lahan Kawasan Industri di Indonesia 42.304 Ha," *Kompas*, 13 Juli 1995

Berbagai penghargaan positif kepentingan imperialis ini menuntut realisasi stabilisasi kehidupan politik. Hal ini dapat disimak dalam penjelasan-penjelasan berikut ini.

Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES [Indonesia]-Lembaga ini dibentuk oleh Partai Demokrat-Sosial di Jerman) pada 21-28 Oktober 1971 menyelenggarakan satu seminar yang bermaksud mendorong pembentukan organisasi buruh tingkat nasional yang tunggal. Seminar tersebut memberikan masukan yang cukup mendasar bagi terjadinya perubahan dalam gerakan buruh, yaitu:

1. Gerakan buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun.
2. Di bidang keuangan tidak boleh tergantung kepada sumber dana dari luar organisasi. Masih berkaitan dengan soal keuangan, intensifikasi pemungutan iuran harus dilakukan berdasarkan sistem pemeriksaan keuangan.
3. Kegiatan Serikat Buruh dititikberatkan di bidang sosial ekonomis.
4. Serikat-serikat Buruh yang ada harus ditata ulang kembali dan dipersatukan melalui pendekatan-pendekatan satu sama lain.
5. Struktur gerakan buruh Indonesia harus dirombak. Setiap lapangan pekerjaan hanya ada satu organisasi buruh, yaitu Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP).⁶³

Agus Sudono menjadi ujung tombak perubahan ini: membangun serikat buruh tunggal.

Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) didirikan 20 Pebruari 1973. Agus Sudono, mantan presiden Gasbiindo, dipilih sebagai ketua. Sedang Soewarto, mantan Opsus, menjadi Sekretaris Umum. 11 Maret 1974 FBSI dikukuhkan sebagai serikat buruh tunggal oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Penunggalan serikat buruh memang masih dalam proses. Karena di lain sisi masih ada peraturan Menteri Perburuhan No. 90 tahun 1955 tentang pendaftaran Serikat-serikat buruh. Pemerintah pada akhirnya mencabut peraturan tersebut dengan menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi No. Per./01/Men/1975 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh.

Peraturan baru ini menegaskan bahwa organisasi buruh yang dapat mendaftar di Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ialah Organisasi Buruh yang Berbentuk Gabungan Serikat Buruh yang mempunyai pengurus sekurang-kurangnya di 20 Daerah Tingkat I dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 15 Serikat Buruh. Peraturan baru ini membuat orang tidak dapat secara mudah mendaftarkan organisasi buruh seperti terjadi di masa sebelumnya.

Juga diperkenalkan ideologi *Hubungan Perburuhan Pancasila* (HPP). Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1966 dilontarkan oleh Menteri Perburuhan. HPP merupakan reaksi terhadap hubungan perburuhan sebelum 1966 yang dianggap terlalu radikal.

Pada tanggal 4-7 Desember 1974 pada Seminar nasional tentang Hubungan Perburuhan Pancasila dirumuskan "hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah), didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi keseluruhan sila Pancasila dan UUD'45, serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. 3 Prinsip dasar atau Tridharma yang mendasari HPP yaitu:

1. Prinsip *rumongso handarbeni* yaitu prinsip merasa ikut memiliki (*partner in profit and partner in production*).

⁶³ Agus Sudono, *FBSI Dahulu, Sekarang Dan Yang Akan Datang*. Jakarta 1981, hal. 15.

2. Prinsip *melu harungkebi* yaitu prinsip ikut mempertahankan dan memajukan (*partner in responsibility*).
3. Prinsip *mulat sarira hangroso wani* yaitu prinsip keberanian untuk mawas diri (*awareness*).

Di sinilah buruh dijadikan “keluarga-besar” perusahaan, tidak berposisi antagonis.⁶⁴

Pada tahun 1985 Soeharto merasakan bahwa Agus Sudono mulai tidak dapat dikontrol, kemudian Sudono disingkirkan. FBSI diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan dipilih Imam Sudarwo sebagai ketua. HPP pun diubah menjadi Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Kata ‘buruh’ diperhalus dan diubah menjadi ‘pekerja’ atau ‘karyawan.’ Kementerian Perburuhan menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker).⁶⁵

Agar terlihat ada keberagaman sejak 1990an di dalam SPSI dibentuk Serikat Pekerja Sektor maksudnya akan menuju sistem *industrial unionism*. Ada 13 sektor yaitu: Sektor Pekerjaan Umum dan Bangunan (PUB); Sektor Perikanan dan Kehutanan (PK); Sektor Niaga, Bank, dan Asuransi (NIBA); Percetakan dan Penerbitan (Perpen); Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMN); Pariwisata (PAR); Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP); Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM); Tekstil, Sandang, dan Kulit (TSK); Transportasi (TRANS); Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI); Pertanian dan Perkebunan (PP); Farmasi dan Kesehatan (FARKES).

Kemudian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)—yang pada mulanya ikut membentuk FBSI—didaftarkan sebagai Serikat Pekerja di luar SPSI.

Pada dasarnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Rejim Soeharto tidak berfungsi dengan baik. Untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan digunakan kekuasaan tangan besi. Militer diberi kekuasaan luas dalam mengkondisikan stabilitas politik. Menteri

⁶⁴ T. Mulya Lubis, 1981, “Keadaan Buruh Kita Dewasa Ini: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *Prisma*, nomor 1, Januari. Hal. 50 *passim*.

⁶⁵ Terjemahan Bahasa Inggris untuk Menteri Tenaga Kerja adalah *Minister of Manpower*. Sementara di negeri-negeri tersebut posisi seperti itu disebut *Minister of Labour*. Pemilihan kata *manpower* bermakna tidak menghargai kaum perempuan, tidak *gender perspective*.

Tenaga Kerja pun berasal dari militer, misalnya Laksamana Sudomo. Berbagai aksi buruh, yang sebetulnya non kekerasan, dihadapi dengan kerasnya laras senjata bukan pendekatan kekeluargaan, *partnership* cerminan dari Tridharma atau melalui serikat pekerja. Sebuah kasus yang mengundang perhatian dunia internasional adalah pembunuhan Marsinah.

MARSINAH—buruh PT Catur Putra Surya (CPS), Porong, Sidoarjo-Surabaya—mati sangat mengenaskan tubuhnya ditemukan pada 8 Mei 1993. PT CPS adalah pabrik yang memproduksi jam tangan. Kematian Marsinah disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh aparat militer pasca pemogokan buruh di pabrik tersebut yang mengakibatkan 13 buruh di-PHK oleh Kodim Sidoarjo.⁶⁶ Dia meninggal dalam keadaan vagina dan rahimnya hancur diterobos benda tajam serta tubuh memar oleh pukulan.⁶⁷

Orang Perancis bilang: "l'histoire cèrepète" (sejarah berulang). Hal yang terjadi di Sumatera Timur seabad yang lampau berulang kepada Marsinah.⁶⁸ Teror dalam hubungan industrial. Bila di Sumatera Timur teror dilakukan oleh pihak pengusaha (sementara negara tutup mata); di jaman Orba, negara menggunakan aparat militernya—kalau dipersoalkan oleh pihak lain, maka kasus dipersempit dan bukan tanggung-jawab lembaga militer namun 'oknum' militer—melakukan teror. Dalam kasus Marsinah persoalan harus dilihat berangkat dari Kodim—bukan dalam kerangka hubungan industrial—mem-PHK buruh. Kodim adalah lembaga militer milik negara.

Kematian Marsinah mengundang beberapa LSM bergabung untuk melakukan investigasi. Dibentuk kelompok Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM) yang beranggotakan beberapa LSM

⁶⁶ "The Tragedy and Significance of Marsinah's Murder," *Worker's Unity*, Newsletter of the Indian Ocean Trade Union Conference, Vol. 1, November 1994. Hal. 8-10. "The Muder of Marsinah A Year After," *Indonesian News*, vol. I, No. 2, May-June, 1994. Yayasan Maju Bersama. Hal 1-3.

⁶⁷ Untuk mengetahui lebih jauh proses peradilan kasus Marsinah yang dikonstruksi oleh militer, lihat ringkasan hasil investigasi KSUM yang dijabarkan oleh Yudha Prastantiono, "Mereka Tidak Bersalah!!!," tanpa tahun terbit (1995 ?), *Kuli*, nomor 2, Yayasan AREK, hal. 38-50.

⁶⁸ Lihat penjelasan di muka.

perburuhan dan buruh. Simpati terhadap Marsinah menjadi tidak hanya hadir dari dalam negeri tetapi pula hadir dari negeri-negeri tetangga seperti dari Jepang, Singapura, Filipina, Australia.

Marsinah bukan satu-satunya kasus pembunuhan terhadap buruh. Hal ini juga terjadi terhadap Rusli. Rusli, 30 tahun, bekerja pada Industri Karet Dili (IKD), Medan. Pada 11 Maret 1994 3.000 buruh IKD melakukan pemogokan. Ketika pemogokan tersebut terjadi kebrutalan buruh karena poster-poster mereka disobek satuan pengaman (satpam). Pada saat bersamaan buruh pabrik Gunung Gahapi Sakti dan Cipta Rimba Djaya juga melakukan mogok. Lokasi pabrik mereka bersebelahan. Buruh melakukan perusakan alat-alat laboratorium. Pihak perusahaan memanggil polisi. Polisi melakukan pengamanan dengan tembakan yang diarahkan ke buruh. Buruh panik berlarian. Pada saat tersebut Rusli tercebur ke Sungai Deli. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian. Tak ada yang percaya bahwa Rusli mati terbenam di sungai. Rusli dikenal sebagai perenang yang baik. Pada kepala Rusli terdapat luka pukulan. Dalam kasus tersebut 29 buruh ditangkap. Sehari setelah peristiwa, 15 ribu buruh mengadakan *rally* untuk solidaritas terhadap Rusli dan menuntut pelepasan teman-teman mereka yang ditangkap polisi.⁶⁹

KEBIJAKAN UPAH MINIMUM. Laporan Warner International Management Consultants menyebutkan dalam tahun 1988 upah tenaga kerja Indonesia per jam US\$ 0,22, tahun 1987 hanya US\$ 0,20/jam. Itu artinya terendah di antara 50 negara yang dievaluasi. Yang tertinggi adalah Swiss, yaitu US\$ 17,15/jam, kemudian Belanda, US\$ 15,62/jam, Jepang US\$ 14,93/jam, Jerman Barat US\$ 14,71/jam, dan Amerika Serikat US\$ 9,42/jam.⁷⁰

Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melakukan pendefinisian tingkat upah yang disebut Upah Minimum Regional (UMR). Tingkat upah yang rendah memang menjadi kebijakan pemerintah nasional. Bila buruh menginginkan upah lebih besar mereka harus siap kerja-lembur. Namun banyak perusahaan tidak

⁶⁹ "Again A Worker Murdered," *Indonesian News*, vol. I, No. 2, May-June 1994, Yayasan Maju Bersama.

⁷⁰ Sebagai dikutip oleh Hendarmin Djarab, 1991, "Kebijakan Upah Minimum," *Korpri*, nomor 173, Maret, hal. 11.

menyiapkan kerja-lembur terutama perusahaan yang telah menjalankan pabrik dalam 3 *shift* (termin kerja).

Upah yang rendah sebetulnya tidak akan menjadi masalah bila harga kebutuhan hidup juga sesuai dengan uang yang diterima. Kenyataan tidak demikian. Harga-harga kebutuhan hidup terus merayap naik bahkan dalam kondisi perekonomian tak menentu yang disebabkan fluktuasi rupiah terhadap dollar AS maupun yen Jepang kenaikan harga cenderung cukup tajam.

Harga buruh murah menjadi satu-satunya jaminan untuk menarik investasi asing. Buruh dijadikan logika keunggulan komparatif (*comparative advantage*) oleh pemerintah. Sementara tidak ada upaya menyiapkan keunggulan komparatif lainnya. Sepanjang berkuasanya rejim Soeharto apa yang disebut sebagai pungutan liar (*unofficial levy*) begitu luas menggejala dan membebani industri. Diperkirakan pungutan liar ini membebani industri sebesar 20 - 25 persen dari biaya produksi. Andaikan berbagai pungutan tersebut dialihkan untuk membayar upah buruh?! Jadilah pemogokan buruh lebih sering menuntut upah ketimbang hal lain.

PEMOGOKAN: Pada 4-5 Maret 1992, 2.500 buruh PT Evershinetex, Bogor, mogok menuntut tunjangan hari raya (THR).⁷¹ 31 Januari 1994, 5 ribu buruh pabrik tekstil PT. KAHATEX, Cigondewah-Bandung (Jawa Barat), mogok.⁷² Mereka menuntut perusahaan menerapkan UMR yang baru. 1 Pebruari 1994, 13 ribu buruh PT Batik Keris, Solo mengadakan *rally* di jalan Slamet Riyadi. Mereka bermaksud bertemu Menaker Abdul Latief. Mereka bermaksud menyampaikan kondisi buruk yang ada di perusahaan batik tersebut ke Menaker.⁷³

25 ribu buruh dari 43 pabrik di Kawasan Industri Medan (KIM) pada 14 April 1994 melakukan demonstrasi. Mereka bermaksud bertemu dengan Gubernur untuk menyampaikan tuntutan mereka yaitu: kenaikan upah sebesar Rp. 7.000,-, hak bebas berorganisasi

⁷¹ *The Limits of Openness, Human Rights in Indonesia and East Timor*, 1994, Human Rights Watch/Asia, September, hal. 51.

⁷² "Strike at Kahatex Ltd.," *Indonesian News*, vol. I, No. 1, March-April 1994, Yayasan Maju Bersama.

⁷³ "Strike at Batik Keris Ltd.," *Indonesian News*, vol. I, No. 1, March-April 1994, Yayasan Maju Bersama.

seperti terjamin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/ Men/1994, dan investigasi kasus kematian Rusli (penjelasan kasus ini lihat di atas). Mereka gagal bertemu gubernur. Namun mereka tidak beranjak dari Lapangan Merdeka. Militer mulai membubarkan mereka. Mereka pindah ke kawasan KIM. Namun ternyata mereka dihentikan oleh militer yang lain. Terdengar ada provokasi dari orang-orang tak dikenal. Hal ini menimbulkan sebagian orang terpancing untuk melakukan pengrusakan. Pada kerusuhan tersebut direktur PT Sandaratama Agraperkasa, terletak di KIM, mati terkena lemparan batu. Pemogokan tidak berhenti sampai di situ. Pemogokan keras ini berlangsung 4 hari. Melibatkan buruh-buruh dari tempat lain seperti Binjai, Tanjung Morawa dan Belawan. Selama pemogokan tersebut 52 pabrik berhenti beroperasi. Sementara sebetulnya di tiga kota belakangan terjadi pemogokan hingga hari ke-7. Dalam pemogokan tersebut juga beredar selebaran anti-Cina yang disebar oleh Pemuda Pancasila. SBSI harus menanggung beban menjadi penanggung jawab pemogokan ini.⁷⁴

Sementara pada 3 Mei 1994 300 buruh pabrik tekstil Toyo Tex di Lugosobo, Purworejo (Jawa Timur) mogok menuntut upah minimum. 4 Mei 1994, 2.600 buruh PT Mayora Indah di Pasirjaya, Jatiuwung-Tangerang (Jawa Barat) mogok. Buruh pabrik biskuit ini menuntut upah minimum. Demikian beberapa pemogokan yang dapat disebutkan.

Jumlah kasus pemogokan 1985 - 1994

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
78	73	37	39	19	61	100	251	300	1.350

Sumber: *Cerita Kami*, nomor 13, Tahun ke VI, Maret 1996

PASUKAN ANTI-PEMOGOKAN. Militer (Angkatan Darat, Kopasus) dan polisi (Brimob) telah lama dikenal sebagai ujung-tombak dalam menggebuk aksi-aksi buruh. Banyak sekali pemogokan dicap sebagai PKI. Bila ada pihak lain terlibat, misalnya ornop, cap PKI akan semakin kuat ditempelkan. Cap lain yang juga digunakan dan sejajar dengan PKI adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Cap yang menunjukkan kebodohan si pembuat.

⁷⁴ Selengkapnya kasus ini dapat dilihat dalam "Thousands of Workers Ralies in Medan, North Sumatera," *Indonesian News*, vol. I, No. 2, May-June 1994, Yayasan Maju Bersama.

Organisasi apapun pasti memiliki bentuk.⁷⁵

Mengapa harus dicap PKI? Karena PKI dikenal sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan buruh.

Namun hal ini menjadi tidak masuk akal: bukankah PKI telah dibubarkan oleh Soeharto.

Kebutuhan mencap PKI sendiri lebih merupakan kebutuhan pragmatis rejim Soeharto dalam melakukan pengganyangan setiap bentuk instabilitas politik. Dengan menggunakan cap ini membunuh pun menjadi benar, lihat misalnya kasus Marsinah dan Rusli.⁷⁶

Sedikit sekali kasus yang bersih dari cap PKI. Berikut adalah yang sedikit itu. Kasus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang dilarang untuk sementara waktu di wilayah hukum Kodam I Bukit Barisan. Sebab, dari kegiatan SBSI di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit (Deli Serdang), Bakorstanasda memperkirakan, kegiatan itu “*bisa menimbulkan akibat terganggunya stabilitas keamanan*,” tegas ketua Bakorstanasda Mayjen TNI Sedaryanto yang juga Pangdam (Panglima Daerah Militer) I Bukit Barisan kepada wartawan di Markas Kodam I BB, Medan, (27/11/95). Sementara Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan di

⁷⁵ Dalam tulisan ini tidak dibahas panjang lebar isu PKI ini. Bila ingin tahu lebih jauh *discourse* tersebut beberapa tulisan yang cukup jelas tentang pen-cap-an ini dapat dilihat seperti: “OTB adalah Kelompok Komunis Gaya Baru,” *Kompas*, 12 Okt. 1995; “Communism much alive: General,” *The Jakarta Post*, Oct. 16, 1995; “Recent unrest may be work of communists,” *The Jakarta Post*, Oct. 13, 1995; “Unionist, academic deny they are communists,” *The Jakarta Post*, Oct. 18, 1995; “Judge cautions military over communist hunt,” *The Jakarta Post*, Oct. 20, 1995; “Solo,” *Kompas*, 1 November 1995.

⁷⁶ Pembantaian tahun 1960an dengan cap PKI—yang dalam versi Orde Baru identik dengan atheis (tidak beragama) —membenarkan tindakan pengganyangan dalam kerangka berpikir yang dibuat mirip Jihad (dalam Islam). Tindakan mengganyang pemogokan buruh—yang dicap PKI—pun masuk dalam kerangka berpikir tersebut. Namun dari sisi pelaku pengganyang, —para oknum militer dan polisi, —nampaknya tidak lebih dari bisnis saja. Bila kita berada dilokasi pemogokan di mana hadir kekuatan militer/polisi, mereka sering hanya hadir bila terbuka *deal* ‘jasa’ (motif ekonomi) antara ‘oknum’ dengan pengusaha. Artinya mereka ‘menjual jasa’ ke pihak pengusaha sebagai “penengah konflik.” Kasus Marsinah cukup mengindikasikan ‘penjualan jasa’ tersebut: mem-PHK buruh di kantor Kodim.

Medan mengatakan, kegiatan SBSI tetap akan berjalan meski dilarang Ketua Bakorstanasda Sumbagut. Sebab, larangan tersebut tidak punya landasan hukum yang jelas. “Bila larangan itu tertulis, SBSI akan menggugatnya ke PTUN,” kata Pakpahan. Persoalannya dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Setelah mempelajari materi yang akan disampaikan dalam pertemuan SBSI yang dibubarkan aparat keamanan, Sedaryanto sampai pada kesimpulan bahwa kegiatan itu bisa menimbulkan terganggunya stabilitas nasional. [...]

[...], pertemuan SBSI se-Sumatera di Panti Jompo Yayasan Gelora Kasih di Kecamatan Sibolangit, Jumat (24/11) dibubarkan aparat keamanan. Sebanyak 31 aktivis SBSI dimintai keterangannya di Polsekta Pancurbatu. Namun sekitar pukul 22.30 WIB semuanya dipulangkan. Yang dimintai keterangan antara lain Amosi Talaumbanua dan Riswan Lubis, ketua dan sekretaris SBSI Medan.

Di antara materi pertemuan itu, ditemukan materi soal “Metode Pengorganisasian Mogok di Lingkungan Pabrik.” Metode pengorganisasian, bisa diartikan mogok yang direkayasa atau diorganisir. Kedua, materi tentang “Metode Pengorganisasian Unjuk Rasa.” Kalau mogok sifatnya menghambat operasi pabrik, unjuk rasa bersifat ke luar. Bisa di lingkungan pengusaha, ke pemerintah dan di luar lingkungan pabrik. Ketiga, “Teknik Mengorganisir Massa.” Artinya, menurut Sedaryanto, yang diorganisir bisa massa di dalam dan di luar pabrik. Dalam hal ini, bisa kerumunan orang, tukang becak atau nelayan.

Yang Keempat, “Teknik Menghitung Rugi Laba Perusahaan.” Materi ini menurut Pangdam I BB, bersifat memberi pelajaran bagaimana menghitung rugi laba perusahaan. “Sehingga bisa mendorong buruh bertanya, berapa sih untung perusahaan, dan berapa pendapatan buruh sendiri. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan atau cenderung kepada pengkondisian tidak puas di lingkungan buruh dan massa,” kata Sedaryanto.

Ditegaskan Sedaryanto, “Karena itulah, demi menjaga stabilitas keamanan yang mantap dan terkendali di daerah Sumbagut, dalam kesempatan ini saya nyatakan kegiatan kelompok yang menamakan dirinya SBSI dilarang untuk sementara.”

Ketika ditanya apakah keputusan itu tidak melanggar ketentuan UU, khususnya tentang kebebasan berserikat, Sedaryanto menegaskan, keputusan itu sama sekali tidak bertentangan dengan aturan yang

ada. Sebab, kata Sedaryanto, dasar pelanggaran terfokus kepada penemuan makalah-makalah yang bisa membahayakan keamanan di daerah Sumbagut. Apalagi pertemuan tersebut dilakukan tanpa izin.

[...]

Namun menurut Pakpahan, semua materi [...] itu, tidak satupun bertujuan negatif. Dengan diajarkannya materi pengorganisasian mogok dan unjuk rasa, teknik menggerakkan massa, menurut Pakpahan, justru merupakan hal positif. Pengajaran metoda-metoda tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kasus unjuk rasa buruh seperti bulan April 1994 yang sempat memakan korban jiwa.

[...], SBSI mengajarkan tiga tahap penyelesaian perselisihan perburuhan. Pertama, dengan Tripartit dan P4D. Bila gagal, ditingkatkan ke tahap dua dengan aksi mogok atau berhenti bekerja. Bila ini juga tidak mendapat perhatian, tahap berikutnya unjuk rasa. Tahap satu dan dua diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan dan UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969.⁷⁷

Rejim Orde Baru yang tangan besi tentu tidak bisa didebat. Pakpahan cukup jelas mengajukan alasan-alasan dan manfaat pelatihan. Hasilnya dia harus dikurung dalam penjara—selain SBSI akhirnya juga dicap PKI. Banyak aktivis buruh lain juga merasakan dinginnya dinding dan lantai penjara.

Agak mengherankan sebetulnya, untuk apa Menaker Abdul Latief menerbitkan peraturan No.5A/MEN/1994 yang menyingkirkan militer dari konflik industrial (buruh-majikan).

Inisiatif tangan besi lainnya adalah: Suhardiman (SOKSI) pada bulan Mei 1994 mengusulkan pembentukan pasukan anti-pemogokan dan demonstrasi yang diberi nama Baladhika Karya. Pasukan itu dibentuk di beberapa kota industri seperti Jakarta, Surabaya Medan, Semarang. Tugas utama pasukan ini mencegah dan meredam pemogokan buruh. Di setiap kota ditempatkan dua satuan tugas (sat-gas) Baladhika Karya yang terdiri dari sat-gas inti beranggotakan 500 orang dan sat-gas cadangan dengan jumlah

⁷⁷ "Ketua Bakorstanasda Kegiatan Kelompok SBSI Dilarang Sementara di Sumut," *Kompas*, 29 Nov. 1995.

anggota sama. Anggota sat-gas diambil dari penganggur yang banyak terdapat di kawasan industri. Anggota sat-gas cadangan sebagian diambil dari karyawan-karyawan menengah, yang sebenarnya juga merupakan bagian dari kaum buruh. Nampak, pemerintah menggunakan sekelompok kecil buruh, yang biasanya bekerja di bagian administrasi sebagai akuntan, sekretaris, personalia, keuangan dsb. sebagai alat peredam buruh.⁷⁸

ORGANISASI NON-PEMERINTAH (ORNOP) DAN ISU PERBURUHAN. Ornop adalah terjemahan Indonesia dari *Non-Governmental Organization* (NGO) yang juga dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah fenomena luar biasa yang tumbuh sejak tahun 1980an. Ornop tidak memiliki iuran anggota (*membership fee*). Bila pemerintah mendapat bantuan internasional melalui prosedur hutang; maka ornop bernasib lebih baik, mereka mendapat kucuran dana non-hutang, alias hibah (*grant*). Negara-negara maju membentuk lembaga-lembaga pengucur uang hibah (*funding-agency*) yang disalurkan kepada ornop-ornop. Karena pengkondisian tersebut ornop menjadi tidak mandiri secara finansial. Meskipun demikian peran ornop cukup penting di era Orde Baru yang melarang aktivitas politik rakyat. Ornop melalui program-program pendidikan telah membantu membangun kapasitas berpikir rakyat luas yang terdepolitisasi.

Beberapa ornop yang mempunyai perhatian (*concern*) terhadap persoalan perburuhan adalah: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah YLBHI, Yayasan Studi Masyarakat (YSM), Yayasan Maju Bersama (YMB), Yayasan AREK, AKATIGA, Perhimpunan Solidaritas Perempuan, dsb. Publikasi ornop bertemakan soal perburuhan antara lain adalah: *Kekeerasan Penyidikan Dalam Kasus Marsinah* (YLBHI, 1997), "Buruh, Upah dan Hak Mogok," *LINK* (YSM, 1988), *Cerita Kami* (buletin YMB, 1990-1996), *Kumpulan Berita Buruh—KBB* (diterbitkan oleh buruh-buruh Bandung bekerjasama dengan LBH Bandung, 1994-1996), *Koeli* (buletin Yayasan AREK, 1994-1995), *Suara Buruh* (buletin Koperasi Makmur Merata-Cibinong, 1993). Selain itu begitu banyak pertemuan dengan judul seminar, diskusi, pelatihan, workshop,

⁷⁸ "Pemerintah Orde Baru dan Gerakan Buruh," 1994. *Cerita Kami*, nomor 10, Yayasan Maju Bersama, hal. 17.

survey upah dsb. diadakan untuk memperkuat posisi intelektual, posisi tawar, kemampuan berorganisasi, kemampuan manajemen buruh Indonesia.

Hasil dari aktivitas ornop, ada inisiatif membentuk serikat buruh non SPSI. Di awal tahun 1990-an muncul Serikat Buruh Merdeka-Setia Kawan (SBM-SK), disusul Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

Pada 1990 beberapa aktivis berupaya membangun solidaritas dengan membentuk SBM-SK, sebuah serikat buruh independen. Namun kelompok ini terlalu lemah dan kurang mendapat dukungan dari buruh. Belakangan ada upaya membentuk Serikat Buruh Sejati Bogor dan Serikat Buruh Tangerang. Tidak diketahui kelanjutan dari dua kelompok belakangan tersebut.

SBSI didirikan pada 25 April 1992 oleh sekelompok aktivis pro-demokrasi yang mengadakan “pertemuan buruh nasional” di Cipayung, Jawa Barat. Hadir sekitar 100 buruh dari 18 propinsi. SBSI mendapat dukungan dari Abdurrachman Wahid (NU), Sabam Sirait (PDI) dan Asmara Nababan (sekarang di Komnas HAM). Mochtar Pakpahan, seorang *lawyer* buruh dari Medan (Sumatera Utara), menjadi sekjen SBSI.⁷⁹

Dalam perjalanannya SBSI selalu diganggu “teror” oleh aparat kepolisian dan militer. Misalnya pada Oktober 1992 pertemuan para pemimpin SBSI di Tangerang dibubarkan polisi. 14 Juni 1993, 7 buruh pabrik udang, PT. Tambaksari Jalmorejo di Medan di-PHK karena menjadi anggota SBSI. Kongres SBSI yang sedianya diselenggarakan pada 29 Juli 1993 tidak mendapat ijin pemerintah.

Kelahiran serikat-serikat buruh independen tersebut, bagaimanapun, melibatkan ornop-ornop yang notabene bukan buruh. Serikat-serikat buruh ini memang tidak dapat beroperasi di dalam pabrik, karena rejim Soeharto memang hanya mentolerir beroperasinya satu serikat: SPSI.

Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), sekarang berubah nama menjadi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

⁷⁹ *The Limits of Openness, Human Rights in Indonesia and East Timor*, 1994, hal. 46.

didirikan oleh Perkumpulan Rakyat Demokratik (PRD-sekarang menjadi Partai Rakyat Demokratik) pada November 1994. Ketua PPBI adalah Dita Indah Sari yang mantan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Kelompok ini menerbitkan buletin *Workers Banner* (Bendera Buruh)—judul yang diambil dari terbitan SOBSI—beredar dalam fotokopian sangat terbatas dan untuk kebutuhan sangat terbatas pula. Kelompok ini—meskipun mengklaim diri sebagai serikat buruh—sebenarnya dijalankan oleh lapisan sosial non buruh: mahasiswa dan mantan mahasiswa. Kelompok ini menjadi terkenal diakibatkan tekanan politik pasca peristiwa 27 Juli 1996—yang sebetulnya diarahkan untuk melumpuhkan PDI (sekarang PDI-P) Megawati Sukarnoputri telah gagal—dialihkan ke penindasan PRD dan ormas-ormasnya oleh Orde Baru. PRD dijadikan bahaya laten komunis baru, sehingga dengan cepat popularitas politik PRD menjadi sejajar dengan PKI yang dihancurkan oleh militer pada 1965.⁸⁰ Demikian PRD menjadi bentuk yang pas untuk menggantikan cap OTB/PKI—yang menjadi tertawaan banyak pihak—pada masa-masa sebelumnya.

Mencuri uang buruh. Negara Indonesia jaman Orde Baru—dan pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto—telah membiarkan penyalahgunakan uang buruh yang dikumpulkan dalam lembaga Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Uang Jamsostek sedianya hanya untuk asuransi. Namun yang terjadi uang ini telah digunakan pula untuk urusan-urusan lain non asuransi buruh. Kasus-kasus penyimpangan penggunaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Waktu	Jenis investasi	Jumlah (Rp Milyar)	Kerugian/ Potensi Kerugian (Rp Milyar)	Penyebab Kerugian
2001	Deposito	540,64	7,21	Pencairan deposito tanpa sepengetahuan direktur keuangan.
2001	Saham dll.	748,12	?	Investasi tak dilkat kontrak
2000	Saham	475,00	?	Pembiayaan akuisisi Arutmin yang tak jelas perhitungannya.
1999	Surat utang Ramako Gerbang Mas	40,00	?	Pembelian tetap dila kukan meskipun tak mendapat persetujuan komisaris.
1999	Deposito	14,52	14,52	Bank Aspac ditutup.
1998	Deposito di	3.500,00	385,00	Jamsostek hanya men

⁸⁰ Lihat *Politik Pembebasan Tapol*, 1998, *op.cit.*

	Bank BUMN			dapat bunga 14% ketika bunga pasar 25%. Kerugian akibat harga saham jatuh,
1998	Saham, rek sadana, obligasi	764,75	113,79	
1997	Pembayaran tunai	1,29	1,29	Dana dipakai untuk kampanye Golkar.
1997	Pembayaran Menara Jamsostek	370,41	128,47	Ada dugaan <i>mark-up</i> sehingga Menara Jamsostek menjadi gedung termahal di Jakarta.
1995	<i>Commercial paper</i> Nugra Santana	36,00	62,75	Utang ini dibayar dengan tanah, tapi Jamsostek justru menombok karena harga tanah dinilai lebih tinggi ketimbang nilai CP.
1994	Pengadaan kartu peserta Jamsostek	896,88	705,45	Ada dugaan <i>mark-up</i> .
1990-1991	Pembelian tanah di berbagai lokasi	30,11	19,48	Ada dugaan <i>mark-up</i> .

Sumber: ICW, dikutip dalam *TEMPO*, 9 Juni 2002, "Jamsostek: Buruh Menabung, Jamsostek Menghamburkan," hal. 144-5.

EPILOG

KRISIS KAPITALISME GLOBAL DAN KEBANGKRUTAN INDONESIA

Krisis finansial menjelang kejatuhan Soeharto dapat dilacak mulai dengan 1). likuidasi 16 bank pada Oktober 1997. Ini menyebabkan ribuan nasabah bank dengan simpanan di atas 20 juta potensial kehilangan uangnya.⁸¹ 2). Dilanjutkan dengan penyitaan emas dan uang rupiah di bandar udara (bandara) Sukarno-Hatta dan

⁸¹ Pada akhir Pebruari 1998 pemerintah berjanji akan membayar seluruh uang milik nasabah yang disimpan pada 16 bank likuidasi. Untuk nasabah yang mempunyai simpanan dalam dollar akan dibayarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada Agustus 1997 sekitar Rp. 3.000,-. Sementara di bank lain, yaitu BCA, telah terjadi kepanikan nasabah. Pada tanggal 3 Maret 1998 nasabah-nasabah BCA menarik uang mereka disebabkan ada desas-desus uang BCA akan digunakan untuk membayar cicilan nasabah 16 bank likuidasi.

BCA—bank swasta terbesar di Indonesia kurun Soeharto—menjadi bangkrut disebabkan oleh pemegang saham terbesar—anak-anak Soeharto (*crony*), yang menjadi komisaris di situ,—telah mengambil seluruh uangnya jauh-jauh hari sebelum krisis secara resmi dinyatakan oleh pemerintah. BCA kemudian diambil alih oleh pemerintah untuk disehatkan kembali. Setelah sehat dijual kembali ke swasta asing.

pelabuhan-pelabuhan laut dengan dalih upaya penyelundupan. Hal tersebut sebenarnya menjadi persoalan tersendiri karena melanggar kebijakan rejim devisa bebas. 3). Dilanjutkan dengan memobilisasi kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengajak rakyat menyumbangkan kekayaan demi membantu negara. 4). Khusus untuk buruh, ada pemaksaan pada setiap buruh untuk ikut program Jamsostek. Penjelasan ikut Jamsostek adalah: uang tersebut akan digunakan untuk membantu buruh-buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) agar sebelum mendapat pekerjaan baru di luar pabrik (rumusan ini tentu membuat bingung untuk memahami apa itu Jamsostek). 5). Sedang dari Lingkungan MPR segera setelah memilih Soeharto sebagai presiden untuk yang ke-7 kalinya, dan susunan kabinet ke-7 terbentuk, presiden mengumumkan bahwa gaji-pokoknya selama setahun disumbangkan untuk program pengentasan kemiskinan. Melalui tindakan “pengorbanan” personal ini diharapkan seluruh menteri kabinet ke-7, para gubernur dan bupati, dan para pejabat eselon I melakukan hal serupa. Pengelolaan uang akan dilakukan oleh Menteri Sosial dalam kabinet ke-7, Siti Indra Rukmana (Tutut).

Ambiguitas soal penghematan menjadi muncul: 1). diadakan *Tablik Akbar* pada 30 Januari 1998 di Monas yang menyerap biaya milyaran rupiah. *Tablik* ini diadakan untuk menunjukkan kepada publik bahwa Soeharto masih sehat, sehingga layak untuk tetap menjadi presiden dalam 5 tahun ke depan. 2). Juga, Sidang Umum MPR menghabiskan biaya hingga 44,7 milyar rupiah hanya untuk: “tok, tok, tok, setujuuu....”

Sementara itu kondisi buruh semakin terpuruk oleh krisis kapitalisme. Lebaran tahun 1998 dirayakan dengan PHK besar-besaran dan mencuatkan jumlah penganggur industri mencapai 14 juta jiwa.

World Bank turun tangan untuk meredam kemungkinan kerusuhan menjelang SU-MPR, yaitu dengan mengedepankan program—pinjaman—padat karya bagi kaum ter-PHK: *social safety net* (jaring pengaman sosial-JPS).

Di lingkungan pengusaha dilakukan *merger* (akuisisi) antara beberapa perusahaan guna “menghadapi kehancuran lebih parah.” Perusahaan menjadi keropos karena ternyata posisi kunci dalam

berbisnis yaitu pembuatan L/C dipegang oleh kapital-finans internasional. Dan para kapital-finans ini ada dalam genggamannya negeri-negeri adikuasa G7. Upaya apa pun yang akan dilakukan harus dalam perkenan G7.

Bila kembali ke titik awal Orde Baru bahwa IMF dan World Bank menjadi tulang-punggung dari berjalannya Indonesia dengan tugas mulia [atas nama] 'pembangunan' (*development*). Kalau periode Soekarno (1945-1967) yang penuh dinamika aktivitas politik rakyat dianggap membuat tidak ada 'pembangunan.' Ternyata setelah 30 tahun rejim Soeharto resep 'pembangunan' kita sadari juga salah. Stabilitas politik bukan bagian integral dalam membangun kesejahteraan rakyat banyak.

Orde Baru sangat bergantung pada hutang luar negeri. Kebijakan 'pembangunan' hanya dapat direalisasikan dalam kerangka hutang dan investasi asing. Konstruksi 'pembangunan' betul-betul tergantung pada inisiatif dan kapital asing. Hutang sudah sangat besar, saat ini muncul angka US\$ 143 milyar,⁸² gabungan dari hutang pemerintah dan sektor swasta (baca: *crony*). Artinya jumlah tersebut menjadi warisan Soeharto terhadap bangsa (rakyat) Indonesia untuk membayarnya.

Di jaman Soeharto berkuasa, dia tidak kekhawatiran bahwa hutang akan menghabisi Indonesia. Sejak 1995 telah dipikirkan 'strategi' membayar hutang, seperti kutipan berikut:

President Soeharto has reassured the people once again that our foreign debts, currently estimated at around US\$ 100 billion, including the \$40 billion owned by the private sector, are well managed. He reaffirmed that the official foreign borrowings have been used entirely for productive rather than consumer purposes. The funds have been invested to increase the country's economic assets. He said the government could easily repay all its foreign debts by selling part of the state owned companies, which at present have com-

⁸² Berdasarkan catatan yang ada pada Menko Ekuin utang luar negeri Indonesia per 31 Maret 2000 mencapai US\$ 144,23 milyar. Dari jumlah itu utang pemerintah (tidak termasuk utang BUMN) mencapai US\$ 75,03 milyar, sedangkan utang swasta US\$ 69,2 milyar. Sementara utang BUMN tercatat US\$ 5,14 milyar. Dari seluruh utang swasta US\$ 69,2 milyar, utang non perbankan mencapai US\$ 42,5 milyar. Perinciannya PMA sebesar US\$ 27,9 milyar dan PMDN sebesar US\$ 14,6 milyar. (*Kompas*, 23 Agustus 2000.)

bined assets of Rp 358 trillioen (\$ 179 billion). Because Indonesia's foreign debt management has been assessed as quite prudent by foreign creditor, including multilateral aid agencies, such as the World Bank, over the past two decades. The debts have reached as high as 75% of our gross domestic product, or a level more than double our annual foreign debt service burdens have exceeded 30 percent of our annual export earnings and account for 70% of the government's personnel budget, or 38 percent of the total operating budget for the state. In fact, the public sector's capital accounts can now be said to be in deficit in the sense that annual debt servicing and installment payments are larger than new borrowings. These warning indicator, as reflected in the uncomfortable ratios, show that we are treading a very narrow and slippery path. We are widely exposed to the great risk of any rise in international interest rates because almost 50 % of the official foreign debts, notably those from the World Bank and Asian Development Bank are subject to variable interest rates which currently stand at a range of six percent to seven percent. Eventhough oil and natural gas now contribute only about 25 percent of our exports, the oil price volatility still poses big danger to our balance of payments. What makes our position all the more precarious is that all the risk related to our heavy exposure to foreign debts are beyond our management or control. The best we can do to cope with all of inherent risks is to strengthen our economics resilience by maintaining prudent macro-economic policies, including the control of new borrowings by both the public and private sectors, and introducing reform measures to expand our export capability.⁸³

Rejim ini tidak menduga akan terjadi permainan jual-beli valuta asing (valas) oleh *fund manager* George Soros yang berakibat nilai tukar rupiah melemah drastis. Akibat permainan valas bahkan pernah memerosotkan nilai rupiah mencapai nilai terendah: Rp. 16.000,-/USD. Artinya rupiah terdepresiasi hingga 800 persen. Tentu saja ekonomi nasional ambruk.

Orde Baru, dianggap berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri dari posisi presiden pada 20 Mei 1998. Terjadi kebangkrutan negara.⁸⁴ Kebangkrutan yang sebetulnya terjadi disebabkan krisis kapitalisme global.

⁸³ "Our Foreign Debts," *Jakarta Post*, June 15, 1995.

⁸⁴ Saya ulangi: "terjadi kebangkrutan negara." Di lain sisi, individu-individu kaya yang ada di dalam negara tidak bangkrut. Mereka justru menjadi semakin kaya,

Yang dimaksud dari pernyataan ini dapat dilihat dari guliran-guliran masa itu. Misalnya, di awal 1997, ketika Thailand terkena krisis, pemerintah Indonesia menggulirkan *discourse* (wacana) bahwa fundamental (basis) ekonomi Indonesia cukup kokoh sehingga tidak akan terkena krisis. Sebelum itu *discourse* fundamental ekonomi tidak pernah diperbincangkan. Sebetulnya cukup meragukan bahwa Indonesia punya fundamental ekonomi. Bila kita tengok industri manufaktur, mayoritas bahan baku, sekitar 85%, didatangkan dari negeri lain. Artinya hanya sekitar 15% bahan baku lokal. Kemungkinan besar yang dihitung sebesar 15% adalah tenaga kerja (buruh) dan gedung serta listrik. Bila demikian yang dimaksud dalam *discourse* fundamental ekonomi Indonesia kuat adalah: jumlah buruh yang melimpah dan telah didepolitisasi (kehilangan potensi politiknya). Kesimpulannya: krisis menghantam Indonesia disebabkan 85% bahan baku internasional tidak dapat disediakan oleh dalam negeri. Artinya, itu adalah krisis global pula ketimbang krisis Indonesia semata.

Krisis kapitalisme ini di Indonesia mendorong krisis politik. Ketidak-demokratisan Soeharto selama berkuasa telah menjadi bumerang bagi dirinya.

Euforia politik menyambut jaman baru: "reformasi." Lebih dari 150 partai politik terbentuk, lebih dari 140 serikat terbentuk. Ini adalah kondisi-kondisi menarik dalam kehidupan politik Indonesia. Banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan bila mengharapkan benar perubahan. Penggunaan dana Jamsostek salah satunya. Bila kelompok-kelompok politik masih tetap sibuk dengan urusan-urusan individualnya tentu perubahan sulit dijangkau.

Tulisan ini berhenti sampai berakhirnya Orde Baru. Ada kesepakatan tak tertulis bahwa masa setelah itu "berbeda." Untuk sementara saya setuju dengan proposisi seperti itu sejauh ada upaya merealisasikan "perbedaan" tersebut.

karena uang mereka disimpan (diinvestasi) dalam US\$ (seringkali juga disimpan di bank internasional seperti di Negara Swiss). Kemerosotan nilai rupiah terhadap US\$ membuat kemampuan belanja individu-individu kaya ini semakin besar. Soeharto dan keluarganya telah meraup begitu banyak uang di masa Orde Baru. Majalah *TIME* mengungkapkan hal ini dalam *Special Report* "Suharto Inc. How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune." *Time*, May 24, 1999. Hal. 16-28.

RUJUKAN

SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN

Van den Bosch

- 1834 *Eenige Zakelijke Extracten uit een Algemeen overzicht, door Z.E. den Komissaris Generaal Van Den Bosch, te zamen gesteld, gedagteekend 24 Januarij 1834.* Disisipkan dalam Arsip Karesidenan Pekalongan nomor sudut 9, 7/1-4.

Besluit 2 Februari 1843 No. 11. Dilampirkan:

- *Proces verbal* 29 November 1842.
- *Missive Raad van Indie* kepada Residen Pekalongan, 10 Desember 1842.
- *Missive* Residen Pekalongan kepada Gubernur Jenderal, 12 Nov. 1842.
- *missive* Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures*, 4 Januari 1843.

Commissie Umbgrove

- 1854 Angket mengenai tanah, desa, penduduk, jalan dan lain-lain, yang dijawab oleh lingkungan pengusaha perkebunan keresidenan Pekalongan, dengan daftar-daftar kira-kira 1854. *Archieven Cultures 1816-1900*, nomor 1584.

SUMBER YANG TERBIT

KORAN, MAJALAH DAN NEWSLETTER

“Again A Worker Murdered”

- 1994 *Indonesian News*, vol. I, No. 2, May-June, Yayasan Maju Bersama.

“Amsterdam Meeting sepakat beri bantuan 325 djuta dollar AS kepada Indonesia.”

- 1967 *Berita Yudha*. 24 November.

“Communism much alive: General”

- 1995 *The Jakarta Post*, Oct. 16.

Djarab, Hendarmin.

1991 "Kebijakan Upah Minimum," *Korpri*, nomor 173, Maret.

"Jamsostek: Buruh Menabung, Jamsostek Menghamburkan."

2002 *TEMPO*, 9 Juni.

"Judge cautions military over communist hunt,"

1995 *The Jakarta Post*, Oct. 20.

"Kongres-Nasional Sobsi ke II tg. 9 s/d 20 Djanuri 1955 di Djakarta."

1955 *Suara Buruh PTT*. Diterbitkan oleh Pengurus Besar SB. Postel, tahun ke X, Djan-Febr.

"Lahan Kawasan Industri di Indonesia 42.304 Ha"

1995 *Kompas*, 13 Juli.

Marco

1918 "Djangan Takoet," *Sinar Djawa*, Kamis 11 April, No. 82.

"Mei 1923 artikel 161 Bis, Mei 1926 artikel 153 Bis dan 153 TER"

1926 *Si Tetap*, No. 4-5, April dan Mei.

Moeso

1925 "Boekoe-Boekoenja Sendiri, pikiran-pikiran sendiri, Moraal Sendiri." *Proletar*, 23 Juli, nomer 87 tahoen ke 43.

"OTB adalah Kelompok Komunis Gaya Baru"

1995 *Kompas*, 12 Okt.

"Our Foreign Debts."

1995 *Jakarta Post*, June 15.

"Pemerintah Orde Baru dan Gerakan Buruh."

1994 *Cerita Kami*, nomor 10. Yayasan Mau Bersama.

Prastantiono, Yudha.

“Mereka Tidak Bersalah!!!,” tanpa tahun terbit (1995 ?), *Kuli*, nomor 2, Yayasan AREK.

“Recent unrest may be work of communists”

1995 *The Jakarta Post*, Oct. 13.

Sandra.

1954 “Sedjarah Gerakan Buruh di Indonesia.” *Tindjauan Masalah Perburuhan*, 3-4, VI, Juni-Juli, Kementerian Perburuhan Republik Indonesia.

“Setelah Napol PKI Dibebaskan Habibie, Awas PKI Bangkit Kembali.”

1999 *Forum Keadilan*, nomor 1, tahun VIII, 11 April.

Sinar Djawa, 6 Februari 1917; 24 Desember 1917.

Sinar Hindia, 18 Augustus 1924.

“Solo”

1995 *Kompas*, 1 November.

“Strike at Batik Keris Ltd.,”

1994 *Indonesian News*, vol. I, No. 1, March-April, Yayasan Maju Bersama.

“Strike at Kahatex Ltd.,”

1994 *Indonesian News*, vol. I, No. 1, March-April, Yayasan Maju Bersama.

Suara Partai Masyumi.

1954 No. 6-7, Th. Ke VIII.

“Suharto Inc. How Indonesia’s Longtime Boss Built a Family Fortune.”

1999 *Time*, May 24.

“The Tragedy and Significance of Marsinah’s Murder”

1994 *Worker’s Unity*. Newsletter of the Indian Ocean Trade Union Conference, Vol. 1, November.

“Thousands of Workers Ralies in Medan, North Sumatera”

1994 *Indonesian News*, vol. I, No. 2, May-June, Yayasan Maju Bersama.

“Unionist, academic deny they are communists”

1995 *The Jakarta Post*, Oct. 18.

Wiradi, Gunawan.

1983 “Kuli Kenceng di Pedesaan Jawa - Apa Masih Ada?,” *Kompas*, 23 Maret.

Workers Banner.

1994 Official Publication of Center For Indonesian Working Class Struggle [Terjemahan Inggris untuk PPBI], Jakarta, November.

“Setelah Napol PKI Dibebaskan Habibie, Awas PKI Bangkit Kembali.”

BUKU DAN ARTIKEL (JOURNAL)

Algemeen Landbouw Weekblad.

1928 Hal. 1316-1317.

Allen, George C. dan Donnithorne, Audrey G.

1957 *Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A study in Economic Development*. George Allen & Unwin Ltd. London.

Cahyono, Edi.

2001 *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*. LEC.

Castles, Lance.

1982 *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Sinar Harapan.

Deer, Noel.

1949 *The History of Sugar* (vol. 1 & 2). Chapman and Hall Ltd. London.

Depagitprop CC PKI.

- 1958 *Apa Partai Komunis Itu.* Diktat untuk KPS dan KPSS tentang “Pembangunan Partai.” Djakarta.

Djalan Baru Untuk Republik Indonesia.

- 1953 Rentjana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konperensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948, Tjetakan ke-VII, Jajasan “Pembaruan” Djakarta.

Gasbiindo Soko Guru Revolusi Indonesia.

- 1964 Djakarta.

Ingleson, John.

- 1981 “‘Bound Hand and Foot’: Railway Workers And The 1923 Strike in Java,” *Indonesia*, 31 (April), Cornell Modern Indonesia Project, hal. 53-87..

Kartodirdjo, Sartono dkk.

- 1976 *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI), jilid V. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, T. Mulya.

- 1981 “Keadaan Buruh Kita Dewasa Ini: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *Prisma*, nomor 1, Januari.

Mansvelt, W.M.F.

- 1924 *Geschiedenis van de Nederlandsche Handelmaatschappij.* Jilid I. Dicitak oleh Joh Enschede en Zonen Haarlem.

Memori Serah Jabatan 1921-1930, (Java Barat).

- 1976 Arsip Nasional Rpublik Indonesia (ANRI).

“Pembantaian 1965”

- 2002 *Diskusi Bulan Purnama, Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000.* Jaringan Kerja Budaya. Maret.

1998 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Polak, J.B.A.F. Mayor.

1961 "Tentang Cultuurstelsel dan Penggantiannya." *Penelitian Sedjarah*, no. 4, th. II, September. Hal. 13-25.

Raffles, Thomas Stamford.

1817 *The History of Java*. Yang digunakan terbitan Oxford University 1982, pengantar oleh John Bastin. Kuala Lumpur.

Razif.

1998 *Sejarah Pemikiran Serikat Buruh Indonesia*, YLBHI, Mei.

Resolusi Central Comite Partai Komunis Indonesia.

1952 *Kewadajiban Front Persatuan Buruh*. Jajasan "Pembaruan," Djakarta.

Sandra.

1961 *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. PT. Pustaka Rakjat. Djakarta.

Schrieke, J.J.

1922 *Atoeran-Atoeran dan Asas-Asas Pembagian Kekoeasaan (Desentralisasi)*. Terj. Agus Salim, Balai Pustaka, Batavia.

Sd., Subhan.

1999 *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Bentang Budaya, Cetakan ke-2, Pebruari.

Siregar, Madjid.

1953 *Perkembangan Serikat Buruh di Beberapa Negara*. Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat N.V., Djakarta.

Sjahrir.

1933 *Pergerakan Sekerdja*. Daulat Ra'jat. Djakarta.

Suroto, Suri.

1985 "Gerakan Buruh dan Permasalahannya." *Prisma*, no. 11. H. 25-34.

Sutjipto, FA (ed.).

1975 *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV. Seri Sartono Kartodirdjo, dkk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Soe Hok Gie.

1999 *Di Bawah Lentera Merah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, Februari.

Soetomo

1934 *Soeloeh Sarekat Sekerdja*.

Sudono, Agus.

1981 *FBSI Dahulu, Sekarang Dan Yang Akan Datang*. Jakarta.

The Limits of Openness, Human Rights in Indonesia and East Timor.

1994 Human Rights Watch/Asia, September.

Tichelman, F.

1985 *Socialisme in Indonesie. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging: 1897-1917*. Foris Publication, Dordrecht.

Utomo, Djoko.

1983 "Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19: Kasus Yogyakarta," *Prisma*, 8 Agustus.

Edi Cahyono, lahir 23 Maret 1962. Lulus sarjana sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia pada Juni 1988. Pengalaman kerja menjadi peneliti di Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan (balitbang), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) (Desember 1988-Agustus 1996); *Programme Assistant* pada divisi Civil Society Empowerment-Alternative Development (CSE-AD), International NGOs Forum on Indonesia Development (INFID) Jakarta (Oktober 1996-Januari 2000). Mempelajari cara menjalankan koperasi di beberapa koperasi di Vancouver dan Vancouver Island (Kanada) pada Mei 1995; pada Mei-Juli 1997, mengikuti *short term course* tentang International Policy Advocacy di Washington DC-New York-Vermont, disponsori oleh School for International Training, World Learning (Vermont-Amerika Serikat). Menyelesaikan penelitian tentang “Transnational Relocation Industry in Indonesia, a Case Study From PT Great River Industries (garment) and PT Harapan Daya Utama (electronic) a Political-Economy Study,” kerjasama Yayasan Maju Bersama dengan Murdoch University (Western Australia) (Agustus 1994). Beberapa karya-tulis diterbitkan dalam *Prisma*, *Diponegoro 74* (terbitan YLBHI), buletin *Cerita Kami*, *Annual Labour* (keduanya publikasi Yayasan Maju Bersama), dan menulis “The Unjuk Rasa Movement,” dalam buku *State and Labour in New Order Indonesia*, diedit oleh Rob Lambert, © 1997 Asia Research Centre, Murdoch University, Western Australia. Penulis adalah juga pendiri Yayasan Studi Masyarakat (1987), Yayasan Maju Bersama (1989), Koperasi Bina Pekerja (1989) Koperasi Maju Bersama (1993), dan Yayasan Penebar (2001). Sejak tahun 2000 ada dalam *Board of Management* dari Labour Education Center (LEC-Bandung). Dan sejak 2002 menjadi anggota *Executive Committee* dari Labour Working Group (LWG-Bandung). Beberapa publikasi yang disunting oleh penulis adalah buletin *Cerita Kami* (Yayasan Maju Bersama); dua buah terbitan INFID, “Indonesia: Demokratisasi di Era Globalisasi” (1998), dan “Menggadaikan Bumi” (1999). Dan terbitan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia “Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2000.” Menikah dengan Nur Rachmi (Anung) dan dikaruniai putra Imam Marco Cahyono (Marco).